

## REFLEKSI DUA PULUH TAHUN FORMAPPI MENGKRITISI DPR<sup>1</sup>

### Pengantar

Sebagaimana baru saja disampaikan oleh Ketua Yayasan FORMAPPI INDONESIA dalam sambutannya tadi, salah satu tujuan FORMAPPI adalah melakukan evaluasi atas kinerja parlemen Indonesia agar dapat terwujud DPR yang fungsional dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia yang menyejahterakan rakyat. Tujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan empat kali amandemen UUD 1945 (1999 s/d 2002), DPR menjadi lembaga Negara yang sangat *powerfull*, antara lain: kewenangan membentuk Undang-undang ada pada DPR. DPR berhak mengajukan usul pemberhentian Presiden; meski Presiden adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, tetapi ketika akan mengangkat Panglima TNI harus mendapat persetujuan dari DPR; BPK adalah badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, tetapi anggotanya dipilih oleh DPR; kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang badan peradilan, dari 9 orang Hakim Konstitusi, 3 orang diantaranya diajukan oleh DPR, dan lain sebagainya.

Pada masa normal, hasil evaluasi tersebut diumumkan kepada publik melalui konferensi pers di kantor sekretariat FORMAPPI di Jalan Matraman Raya 32b Jakarta Timur. Namun selama masa *pandemi covid-19* dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berlanjut pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, hasil evaluasi diumumkan melalui konferensi pers secara *virtual*.

Para jurnalis yang diundang mencakup media cetak, *on line* maupun televisi dan radio. FORMAPPI patut mensyukuri dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan jurnalis dari segala media (cetak, online, televisi maupun radio) di pusat maupun daerah yang tidak bosan-bosannya menggaungkan kritik FORMAPPI atas kinerja DPR selama bertahun-tahun. Lebih dari itu, para jurnalis juga tidak segan-seganya meminta tanggapan/konfirmasi kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang lainnya maupun Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR atas kritik yang telah disampaikan FORMAPPI. Sekedar contoh, pada tahun 2017. Liputan media terhadap gonggongan FORMAPPI mencapai 356 berita. Pada tahun 2018 terdapat 348 berita, tahun 2019 terdapat 889 berita. Pada tahun 2020, pemberitaan khusus atas rilis evaluasi FORMAPPI ada sebanyak 66 berita. Pada tahun 2020, rilis evaluasi FORMAPPI diberitakan oleh media sebanyak lebih dari 1000 berita dan dimasukkan ke laman FORMAPPI (selengkapnya lihat **Lampiran**).

Penyampaian hasil evaluasi kinerja DPR kepada publik tersebut dimaksudkan sebagai upaya "*public education*" sehingga segenap warga masyarakat ikut terpanggil mengawasi DPR yang seluruh anggotanya telah

---

<sup>1</sup>Disiapkan oleh para peneli FORMAPPI, disampaikan oleh M, Djadjiono dalam Webinar Memperingati HUT KE-20 FORMAPPI pada tanggal 30 Agustus 2021.

mereka pilih sendiri secara langsung melalui Pemilu. Sedangkan bagi Pimpinan maupun anggota DPR diharapkan membacanya juga dan menyadari kekurangan-kekurangannya sehingga bersedia memperbaikinya.

Disamping diumumkan melalui media, evaluasi FORMAPPI atas kinerja DPR tersebut disampaikan pula secara langsung kepada Ketua DPR periode 2014-2019, Bambang Soesatyo. Hal itu dilakukan dalam audiensi di ruang pertemuan Ketua DPR pada 25 Juli 2019.

Masalahnya adalah: seperti apakah tanggapan/respon DPR? Apakah kritik atas semua tupoksi (legislasi, anggaran dan pengawasan) serta kelembagaan direspon ataukah dipilih oleh DPR? Adakah perbaikannya dari waktu ke waktu? Sampai kapanakah FORMAPPI harus terus menggonggong: jika ternyata tidak ada perbaikan apakah FORMAPPI sebaiknya berhenti berteriak, atau mungkin ada cara lain yang lebih jitu untuk memperbaiki kinerja DPR? Hal-hal inilah yang diharapkan masukannya dari para nara sumber melalui seminar ini.

### **Evaluasi FORMAPPI dan Respon DPR**

Dalam semangat mendambakan terlaksananya tupoksi DPR secara efektif dan transparan, FORMAPPI menyampaikan beberapa kritik kinerja DPR atas tiga tupoksinya. Ketiga tupoksi itu adalah: fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kecuali itu karena ketiga tupoksi tersebut melekat pada lembaga, maka aspek kelembagaan juga dievaluasi. Sekedar beberapa contoh kritik FORMAPPI dan respon DPR tersebut dapat diuraikan secara berurutan seperti di bawah ini. Namun jika ingin yang lebih lengkap dapat disimak pada **lampiran**.

### **Fungsi Legislasi:**

Dalam rentang waktu bertahun-tahun, FORMAPPI tidak bosan-bosannya mengevaluasi kinerja fungsi legislasi DPR. Sekedar beberapa contoh dapat dikemukakan seperti berikut:

Formappi mencatat bahwa Program Legislasi Nasional Prioritas (RUU Prolegnas Prioritas) tahun 2009-2014 ditetapkan sebanyak 247 RUU, tetapi selama 5 tahun masa jabatannya, DPR hanya berhasil mengesahkan sebanyak 69 RUU atau sekitar 27,94%.

Pada periode 2014-2019, DPR hanya menetapkan 189 RUU sebagai Prolegnas Prioritas 2015-2019, tetapi selama lima tahun (2014-2019), hanya mampu mengesahkan sebanyak 36 RUU atau sekitar 19,04%. Kecuali itu, pada periode ini DPR juga mewariskan 4 RUU yang tinggal masuk ke pembahasan Tingkat II (pengesahan), karena ditentang oleh rakyat melalui unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Keempat RUU tersebut adalah: RUU Perubahan UU KUHP, RUU Perubahan UU Pemasarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU tentang Mineral Batubara. Oleh karena itu keempat RUU tersebut “diwariskan” penyelesaiannya kepada DPR periode 2019-2024.

Sedangkan Prolegnas Prioritas tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada 17 Desember 2019 sebanyak 248 RUU sebagai Prolegnas Nasional 2020-2024. Prolegnas tersebut dipilah pembahasan menjadi

Prolegnas Prioritas tahunan. Untuk tahun 2020 ditetapkan sebanyak 37 RUU sebagai Prolegnas Prioritas, dan sepanjang tahun 2020 hanya berhasil disahkan sebanyak 3 RUU menjadi Undang-undang.<sup>2</sup>

Prolegnas Prioritas tahun 2021 baru dapat disahkan pada Rapur DPR tanggal 23 Maret 2021, sebanyak 33 RUU. Sekalipun begitu, sampai dengan akhir Tahun Sidang 2020-2021, yaitu pada Masa Sidang V, DPR hanya berhasil mengesahkan 1 (satu) RUU menjadi Undang-undang, yaitu UU Perubahan atas UU Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, pada beberapa kesempatan menyampaikan rilis atas kinerja DPR, FORMAPPI berpendapat bahwa kinerja legislasi “lagi lagi” tidak mencapai target penyelesaian.pengesahan RUU Prolegnas Prioritas tahunan yang telah mereka tetapkan sendiri. Karena itu FORMAPPI juga mengkritik bahwa DPR gagal memahami makna dan arti kata prioritas.

Terhadap penilaian rendahnya kinerja legislasi, DPR melalui Wakil-wakil Ketua maupun Pimpinan Badan Legislasi mengiyakannya. Pada 29 Agustus 2016, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan, harus melihat dari berbagai aspek seperti kualitas dan kebutuhan masyarakat. "Dalam menentukan target UU dia sepakat dengan pemerintah, bukan dari segi kuantitas tapi kualitas kebutuhan. Selain itu, untuk membuat UU juga harus ada peran pemerintah. Sebab, jika pemerintah dan DPR tidak satu persepsi maka akan lama pembahasannya. Tak hanya itu, hambatan lainnya dalam pembahasan UU adalah dinamika politik di internal DPR karena banyaknya fraksi partai politik yang berbeda pandangan.<sup>3</sup> Pada 1 Agustus 2017, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto sepakat bahwa masih banyak produk legislasi yang belum rampung dibahas. "Kami memang paling terlihat dalam legislasi dan legislasi kami banyak mengalami kekurangan." Meski begitu, alasan dari kendornya kinerja legislasi harus dilihat dari akar permasalahannya. Produk legislasi juga merupakan hasil kerja DPR bersama pemerintah. Sehingga, tak bisa hanya DPR yang dikritik. "Kalau legislasi jelek, bukan DPR-nya saja yang jelek, pemerintah juga jelek. Sehingga marilah kita perbaiki dan koordinasi,"<sup>4</sup>

Pada 24 November 2018, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan tidak terkejut atas kritikan FORMAPPI, itu bagian rasa cinta masyarakat terhadap DPR. Dia pun menghargai upaya yang dilakukan FORMAPPI untuk mendorong DPR menjadi lebih baik. Sekalipun begitu, respon Ketua DPR tetap saja disertai dengan sayap pembelaan, yaitu berharap agar kritik FORMAPPI juga dapat didengarkan oleh pemerintah karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan UU di DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. DPR tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka. Intinya, kalau kita mau jujur

---

<sup>2</sup> <https://www.beritasatu.com/politik/717423/sepanjang-2020-dpr-hampir-nihil-lahirkan-uu-baru>

<sup>3</sup> <http://www.teropongsenayan.com/69757-target-legislasi-belum-maksimal-ini-jawaban-taufik-kurniawan>.

<sup>4</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/08253641/menanti-dpr-menggenjot-kinerja-legislasi-?page=all>.

pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah." Ia mencontohkan kendala pembahasan pada RUU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah sampai saat ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga DPR belum bisa memulai pembahasannya. Atau kendala lainnya seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Karantina Kesehatan: karena adanya pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah, Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. "Setelah terus menerus diberikan warning oleh DPR RI, bahkan Ketua DPR sampai perlu menelepon Ibu Menteri Kesehatan, akhirnya rapat pembahasan bisa kembali dilanjutkan dan RUU tersebut bisa disahkan pada Juli 2018. Contoh lain, RUU tentang Pengaturan Peredaran Minuman beralkohol dan RUU Tembakau yang sudah melewati 10 kali masa persidangan belum juga tuntas itu antara lain karena minimnya kehadiran dari pihak pemerintah. Semua ada catatannya di kesekjenan DPR RI.<sup>5</sup>

Terkait kritikan FORMAPPI bahwa perencanaan legislasi DPR buruk lantaran sampai dengan MS III TS 2020-2021 belum juga mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sempat terjadi tarik menarik antar fraksi. Namun hal tersebut sudah selesai dan akan diputuskan dalam masa sidang mendatang. Dalam program legislasi memang ada sedikit tarik menarik antara fraksi-fraksi yang kemudian kita sudah bersepakat bahwa kita akan tetapkan Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Maret 2021 di awal masa sidang. Kendati demikian ia berterima kasih kepada Formappi yang kerap menyampaikan kritiknya kepada DPR. Menurutnya, kritikan dari Formappi merupakan masukan agar DPR kedepan lebih baik.<sup>6</sup>

Pada rilis Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2020-2021, FORMAPPI menyatakan bahwa perpanjangan pembahasan RUU memang diizinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Namun alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas, misalnya karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak, serta beban tugas komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus. Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tidak terinformasikan kepada publik.<sup>7</sup> Terhadap kritik tersebut, pada Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 16 Agustus 2021, Ketua DPR Puan Maharani antara lain menyatakan hal hal berikut: RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) memang sempat *mandeg* pembahasannya akibat belum adanya titik temu soal posisi lembaga independen pengelola data pribadi, apakah berada di bawah Presiden

---

<sup>5</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/kritikan-formappi-bamsuet-itu-bagian-rasa-cinta-masyarakat-terhadap-dpr?page=2>

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qplkg4428/dpr-ri-tanggapi-kritikan-formappi>

<sup>7</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/17501161/formappi-dpr-mesti-lebih-produktif-capai-target-pengesahan-ruu>

atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Revisi terhadap UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, DPR dan pemerintah memang sempat membahasnya, hanya saja belum menemui titik temu terkait dengan isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alokasi anggarannya.<sup>8</sup>

### **Fungsi Anggaran**

Terkait fungsi anggaran, FORMAPPI mengatakan bahwa selama 2017, dalam politik anggaran, DPR tidak memiliki keberpihakan pada rakyat. Untuk anggaran di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat memang mengalami peningkatan pada 2018, misalnya, sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, transfer daerah, dan kedaulatan pangan. Namun sayangnya, peningkatan di sektor-sektor itu bukan atas inisiatif DPR melainkan dari pemerintah.<sup>9</sup>

Terhadap pendapat FORMAPPI tersebut, pada 1 September 2017, Ketua DPR Setya Novanto mengemukakan bahwa dalam setiap pembahasan APBN bersama dengan pemerintah, DPR berpedoman dan berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui alokasi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, meningkat 188,93 persen dibandingkan tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa.<sup>10</sup>

Sikap tidak kritis DPR terhadap pembahasan APBN dapat dilihat juga pada MS III TS 2017-2018 ketika membahas laporan pertanggungjawaban APBN T.A. 2017. Komisi-komisi DPR hanya mendengarkan dan mengapresiasi serta mendorong agar pencapaian kinerja K/L terus ditingkatkan di tahun mendatang. Bahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DPR hanya menyesalkan realisasi anggarannya sebesar Rp 6.110.349.718.698, atau 66,87%. Komisi-komisi DPR juga tidak ada yang memperingatkan kemungkinan akan diberikannya penghargaan atau sanksi atas tercapai atau tidaknya target serapan anggaran oleh K/L pasangan kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 258/PMK.02/2015 tertanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056).

Dalam Catatan Akhir Tahun 2018, FORMAPPI menyampaikan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR tidak bisa berbuat banyak atas usulan-usulan Pemerintah, bahkan cenderung mengiyakan sepenuhnya, padahal oleh konstitusi maupun UU, terkait pelaksanaan fungsi anggaran, DPR dapat menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh Pemerintah. Jarang muncul pikiran-pikiran kritis dari DPR sebagai lembaga dalam penyusunan dan pembahasan terhadap APBN sehingga pengesahannya selalu

---

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611a13e915916/dpr-janji-kebut-pembahasan-7-ruu-ini?page=all>

<sup>9</sup><https://www.viva.co.id/berita/politik/989774-dpr-dikritik-tak-pro-rakyat-soal-politik-anggaran>

<sup>10</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/01/setya-novanto-dpr-sudah-pro-rakyat-kok>

berjalan mulus. Mulusnya pengesahan Pertanggungjawaban APBN tahun anggaran sebelumnya maupun RAPBN tahun tertentu menjadi APBN tahun berikutnya tampaknya bukan karena DPR tidak paham persoalan tetapi sikap tersebut dapat dibaca sebagai sikap kompromistis, atau saling tahu sama tahu untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Pada MS IV TS 2017-2018, terkait pembahasan terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017, DPR juga tidak menampakkan “greget” atau semangatnya. Hanya 2 (dua) fraksi yang berbeda pendapat dengan pemerintah, satu menolak (Fraksi Gerindra) dan satu menerima dengan catatan (Fraksi PKS), sementara 8 (delapan) lainnya menyatakan setuju secara berjamaah. Melihat sikap DPR seperti itu dapat diberikan dua catatan: *pertama*: Pemerintah memang piawai untuk merealisasikan APBN 2017, baik pemenuhan target pendapatan negara maupun penyerapan anggaran. Jika demikian halnya, maka memang sulit bagi DPR untuk mengkritisnya. *Kedua*, DPR kurang peka atau tidak paham atau kurang peduli atas pelaksanaan APBN 2017, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Misalnya, mengapa sampai terjadi gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Terkait penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN, DPR menyetujui PMN sebesar 6,5 trilyun kepada PT. PLN dengan mengabaikan laporan BPK dan terjadinya kasus-kasus korupsi yang terjadi di PT. PLN. DPR juga membiarkan terjadinya pelanggaran UU APBN dan APBN-P 2017 oleh Menteri Keuangan terkait subsidi listrik kepada PT. PLN.

Pada 19 Juni 2021 Formappi, menyatakan, Kesetjengan dan Pimpinan DPR RI perlu didorong untuk memastikan bahwa rapat virtual di parlemen tetap menjamin keterbukaan akses publik. Masalahnya karena Isu yang akan dibahas sangat krusial dan potensi DPR melakukan penyimpangan dan kongkalingkong sangat terbuka, mengingat obyek bahasan adalah anggaran dan sejumlah RUU kontroversial yang mendesak diselesaikan, jangan sampai rapat virtual membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan. Proses pembahasan RAPBN 2022 rentan karena muncul banyak kontroversi terkait dengan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan dan pengadaan Alutsista serta “persiapan” Pemilu 2024 yang mulai muncul juga membuka ruang bagi kemungkinan penyelewengan RAPBN 2022 untuk kepentingan Pemilu 2024. Masa-masa ini menjadi masa rawan di DPR. "Hal-hal ini kalau kemudian diserahkan pada proses pembahasan secara virtual, itu rentan 'dimanipulasi'. Mereka menjadikan rapat virtual untuk menghindari publik dalam pembicaraan hal penting terkait anggaran dan RUU kontroversial." Karenanya, "Perlu

---

<sup>11</sup> Tujuan tertentu itu dapat dilihat dari fakta bahwa dalam tahun 2018 ada tiga anggota DPR yang terlibat korupsi, yakni Amin Santono (Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat), Eni Maulani Saragih (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI), dan yang terakhir Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR-RI). Ketiganya diduga telah menerima sejumlah uang sebagai fee karena telah memperjuangkan pengucuran anggaran Dana Akokasi Khusus, Dana Perimbangan Keuangan untuk Daerah maupun pembangunan proyek-proyek bagi daerah tertentu. Ini membuktikan bahwa meski anggota DPR sudah dibayar mahal namun tetap saja mencari uang tambahan dengan memainkan (menjadi calo/mafia) APBN.

keputusan bersama antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi mengenai aturan selama dua minggu ke depan."<sup>12</sup>

Menjawab kekhawatiran tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada GoNEWS.co, rapat anggaran, itu siklus anggaran tinggal dua kali rapat saja dan selama ini nggak ada masalah."<sup>13</sup>

Pada rilis evaluasi kinerja fungsi anggaran DPR selama MS V TS 2020-2021 yang digelar tanggal 12 Agustus 2021, FORMAPPI menemukan banyaknya rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas RKA dan RKP TA 2022 dilaksanakan secara tertutup. pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kongkalikong antara Komisi dengan mitra kerjanya,<sup>14</sup>

Dalam membahas realisasi penyerapan anggaran K/L pada TA 2021, DPR juga hanya mengiyakan laporan K/L meski serap anggaran K/L sampai dengan akhir semester I tahun 2021 rata-rata masih berada di bawah 45%. Lebih dari itu, Komisi-komisi DPR dan Banggar setuju dinaikannya pagu anggaran K/L pada Tahun 2022 sekalipun peraturan perundangan yang ada memberikan peluang bagi DPR untuk tidak menyetujui kenaikan anggaran tersebut."

Terhadap Prognosis Semester II APBN TA 2021, lanjutnya, Banggar DPR lebih fokus pada peningkatan belanja negara dari pada pendapatan negara disaat aktivitas ekonomi Indonesia semakin membaik. Sebaliknya terhadap penerimaan Negara kurang mendapatkan perhatian, padahal Pemerintah terus menerus menaikkan jumlah utang. Bahkan dalam membahas KEM PPKF dan RKP RAPBN TA 2022, Banggar DPR tidak berdaya dihadapan pemerintah. Usaha Banggar untuk menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampak tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN TA 2022. "Terkait dengan peningkatan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dalam menaikkan jumlah utang, sebaliknya mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Padahal menurut BPK, nilai defisit anggaran Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 Triliun atau 6,14% dari PDB. Kecuali itu pengadaan utang Tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisiit." Selain itu, Formappi melihat DPR juga terlihat memberikan karpet merah pada sejumlah BUMN yang akan menerima PMN TA 2022 dan tambahan PMN pada TA 2021, padahal tata kelola keuangan beberapa BUMN sedang bermasalah bahkan banyak BUMN yang merugi maupun terdapat korupsi di BUMN tertentu. "Persetujuan DPR atas penambahan PMN TA 2021 dan pengucuran PMN pada TA 2022 patut diduga sebagai barter antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI yang meminta dukungan PMN untuk BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan yang tidak disertai dengan besaran alokasi dana yang jelas."<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.gonews.co/berita/baca/2021/06/19/memastikan-rapat-virtual-tak-memanipulasi-pembahasan-anggaran-dan-ruu-kontroversial>.

<sup>13</sup> <https://www.gonews.co/berita/baca/2021/06/19/memastikan-rapat-virtual-tak-memanipulasi-pembahasan-anggaran-dan-ruu-kontroversial>

<sup>14</sup> <https://liputan.co.id/2021/08/formappi-sebut-kinerja-dpr-ri-jadi-pepesan-kosong/>

<sup>15</sup> <https://liputan.co.id/2021/08/formappi-sebut-kinerja-dpr-ri-jadi-pepesan-kosong/>

Berbeda dengan kritik FORMAPPI atas rendahnya pelaksanaan fungsi legislasi yang banyak ditanggapi oleh Ketua maupaun Wakil Ketua DPR, sejauh yang dapat ditelusuri dari media massa, FORMAPPI tidak menemukan respon langsung atas kritik-kritik terhadap sangat lemahnya pelaksanaan fungsi anggaran. Mengapa demikian, kiranya DPR sendirilah yang tahu. Semoga saja dugaan terjadinya kong kalikong pembahasan keuangan negara tidak terjadi.

Sebagai catatan terhadap mulusnya pembahasan RAPBN maupun pelaksanaan APBN di DPR dan minimnya tanggapan DPR atas kritik FORMAPPI patut diduga bahwa DPR sebenarnya tidak cukup peduli terhadap perencanaan, penetapan dan pelaksanaan APBN.

### **Fungsi Pengawasan**

Terkait fungsi pengawasan, FORMAPPI mengkritisi hal-hal seperti berikut: bahwa kinerja pengawasan pada 2016 buruk. Hal itu bisa dilihat dari minimnya upaya implementasi hak-hak DPR terhadap pemerintah, baik hak interpelasi maupun angket. Sebab, hanya ada satu kali, yakni hak angket Pelindo. Meski rekomendasi Pansus tidak digubris Pemerintah, anehnya, DPR diam saja.<sup>16</sup> Sebaliknya Ketua DPR Setya Novanto menyatakan pada Rapat Paripurna DPR RI 29 Agustus 2017, antara lain bahwa selama Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) non-RUU, yaitu Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II dan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK.<sup>17</sup>

Pada 15 Maret 2017, FORMAPPI menyatakan bahwa dalam MS III TS 2016-2017 DPR merencanakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota untuk enam pejabat publik yaitu calon ketua dan anggota BPH Migas, calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengawas LPP TVRI, calon komisioner KPU dan Bawaslu tetapi tidak ada satu pun yang berjalan. Padahal sebagian lembaga itu membutuhkan anggota yang baru seperti komisioner KPU dan Bawaslu yang akan habis masa jabatannya pada 12 April 2017. Ironisnya, DPR malah melakukan uji kelayakan dan kepatutan itu terhadap lembaga publik yang tidak direncanakan, yakni calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Rencana *fit and proper test* calon anggota BSBI itu tidak disebut oleh pimpinan DPR saat membuka masa sidang III. Ini merupakan rencana kerja 'siluman'/selundupan.<sup>18</sup>

Seolah menjawab kritik FORMAPPI, dalam Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016-2017, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan antara lain bahwa selama TS 2016-2017, melalui Komisi-komisi. DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan pengangkatan terhadap

---

<sup>16</sup><https://www.indopos.co.id/index.php/read/2017/01/10/82160/fungsi-pengawasan-dpr-diprediksi-melorot>.

<sup>17</sup><http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17425/t/DPR+Masih+Dipercaya+Untuk+Salurkan+Aspirasi>

<sup>18</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cba1c396209/performa-buruk--dpr-tak-hasilkan-uu-selama-masa-sidang-ketiga>

15 (lima belas) pejabat publik. “DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.<sup>19</sup> Tetapi terhadap agenda *fit and proper test* selundupan tersebut tidak direspon.

Pada Januari 2020, FORMAPPI menganggap DPR tak lagi galak ke pemerintah karena urung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan digantikan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi, padahal di periode sebelumnya nampak sangat galak di hadapan pemerintah.<sup>20</sup>

Menanggapi kritik seperti itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 22 Januari 2020 menyatakan bahwa DPR lebih mementingkan uang nasabah kembali dibanding sekadar dianggap galak. Kalau kami sekadar pengen melakukan pencitraan, ya kami bikin Pansus-lah. Panggil sana, panggil sini, tapi nanti nggak sampai tujuan, malah mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini tengah dijalankan Kejaksaan Agung dan Polri, serta mengganggu pemerintah dalam upaya menyehatkan Jiwasraya. Akhirnya Pansus diubah diganti dengan Panja di tiap-tiap komisi terkait. Perubahan itu terjadi karena tiba-tiba ada perkembangan cepat dari pemerintah, maka kita respons cepat juga. “Kalau kita respons dengan Pansus, kita bisa ketinggalan kereta.” Kita bingung, ketika DPR merespons cepat, DPR dikatakan kita kok lembek, kok berubah, kok kelihatannya dipengaruhi pemerintah. Padahal kami melakukan respons yang cepat.”<sup>21</sup> Pernyataan Wakil Ketua DPR seperti itu menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan justru tunduk pada Pemerintah.

Dalam rilis evaluasi kinerja DPR selama MS V TS 2020-2021, FORMAPPI menilai fungsi pengawasan DPR secara kelembagaan (misalnya kesimpulan rapat Komisi atau AKD lainnya) terhadap pelaksanaan APBN seperti serap anggaran maupun temuan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak kritis. Respon terhadap berbagai pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah dan masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat lebih banyak disampaikan secara perseorangan maupun atas nama pimpinan Komisi, atau Pimpinan Fraksi. “Bahkan, pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kongkalikong antara Komisi dengan mitra kerjanya.”

Selain itu, banyak kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat disampaikan secara perseorangan melalui keterangan pers. Sikap kritis perseorangan ini tentu saja tidak berpengaruh pada perbaikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sikap-sikap perseorangan maupun atas nama Fraksi dapat ditafsirkan sebagai upaya menaikkan ‘daya jual’ yang bersangkutan di tengah masyarakat sebagai anjang-ancang Pemilu 2024.

---

<sup>19</sup><http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17425/t/DPR+Masih+Dipercaya+Untuk+Salurkan+Aspirasi>

<sup>20</sup><https://news.detik.com/berita/d-4868493/pimpinan-dpr-soal-pansus-jiwasraya-lebih-penting-galak-atau-uang-kembali?single=1>.

<sup>21</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read267793/dianggap-gak-galak-lagi-dpr-lebih-penting-galak-atau-uang-nasabah-jiwasraya-kembali/0>.

Sesungguhnya DPR menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, misalnya sampai dengan akhir pertengahan TA 2021, serap anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian rata-rata masih di bawah 45%. Meskipun demikian selama MS V TS 2020-2021, DPR tidak sekalipun menggunakan hak konstitusionalnya seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. “Kekritisan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 yang tertinggi hanya sampai pada level mendesak Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian untuk meningkatkan serap anggarannya.”<sup>22</sup>

Sebagai perbandingan, selama Tahun 2014-2019, DPR membentuk Pansus Angket Pelindo II dan Pansus Angket KPK (lihat **Tabel**). Tetapi sampai akhir tahun kedua, DPR periode 2019-2024 sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda membentuk Pansus penyelidikan.

**Tabel 1: Pansus Hak Angket Selama Tahun 2014-2019**

Tahun Sidang	Nama Pansus	Dibentuk/ Diperpanjang	Status
2014-2015	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2015-2016	Pansus Angket Pelindo II	5 Oktober 2015	Selesai 17 Desember 2015
2016-2017	Pansus Angket Pelindo II	Diperpanjang	Belum Selesai
	Pansus Angket KPK	30 Mei 2017	Belum Selesai
2017-2018	Pansus Angket Pelindo II	Diperpanjang	Belum Selesai
	Pansus Angket KPK	Diperpanjang	Selesai 14 Februari 2018
2018-2019	Pansus Angket Pelindo II	Diperpanjang	Selesai 25 Juli 2019

**Keterangan:** Data-data dikutip dari Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019.

Meski kedua Pansus Angket tersebut telah menyelesaikan tugasnya, tetapi Rekomendasi Pansus Angket KPK tidak digubris oleh KPK. Sekalipun begitu DPR diam saja. Rekomendasi Hak Angket Pelindo II yang antara lain meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno tidak digubris tetapi DPR juga diam saja. Langkah yang ditempuh DPR hanyalah melarang Menteri Rini Sumarno menghadiri rapat-rapat dengan Komisi yang menjadi pasangan kerjanya di DPR. Hal itu dilakukan sejak 2015 sampai 2019. Langkah memboikot Menteri BUMN Rini Sumarno ke DPR justru membuat DPR mengalami hambatan ketika harus membahas masalah-masalah yang terkait dengan BUMN. Meski Rekomendasi Pansus Angket tidak digubris, DPR tidak melanjutkan penggunaan hak yang lainnya seperti Hak Menyatakan Pendapat. Hal itu menunjukkan bahwa DPR 2014-2019 tidak bertaring dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Disamping tidak bertaring, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penggunaan keuangan Negara, DPR periode 2014-2019 juga dapat dikatakan

<sup>22</sup><https://liputan.co.id/2021/08/formappi-sebut-kinerja-dpr-ri-jadi-pepesan-kosong/>

cuek bebek. Hal itu nampak pada minimnya tindak lanjut Komisi-komisi terhadap temuan kerugian Negara yang telah dilaporkan BPK sebagaimana dapat disimak pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2: Jumlah Tindak Lanjut (TL) Temuan-temuan BPK oleh Komisi-komisi Tahun 2014-2019**

<b>Tahun Sidang</b>	<b>Masa Sidang</b>	<b>Jumlah TL</b>
2014-2015	I	0
	II	0
	III	0
	IV	1
2015-2016	I	1
	II	0
	III	1
	IV	1
	V	0
2016-2017	I	3
	II	0
	III	4
	IV	0
2017-2018	I	0
	II	0
	III	4
	IV	3
	V	12
2018-2019	I	0
	II	0
	III	4
	IV	0
	V	13
2019-2020	I	0

**Keterangan:** data-data diolah dari Kesimpulan Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi DPR dengan K/L pasangan kerjanya yang diunggah pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).

**Catatan:**

1. Terkait temuan-temuan BPK, termasuk terjadinya kerugian Negara, berdasarkan data-data dari Lapsing Rapat-rapat Komisi dengan Pasangan Kerjanya sangat minim dilakukan. Hal ini mengandung arti bahwa DPR tidak peduli terhadap kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh Pemerintah.
2. Jikapun Komisi DPR melakukan rapat untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan K/L yang menjadi pasangan kerjanya, kesimpulan/rekomendasi rapat bersifat sangat lunak (lima M: memahami, mengapresiasi, memnita, mendorong dan

mendesak untuk memperbaiki), padahal seharusnya dapat juga ditambah satu M lagi, yaitu menggunakan hak penyediaan (angket). Satu-satunya penggunaan hak angket hanya dilakukan terhadap PT Pelindo II, sebaliknya kerugian negara yang terjadi PT PLN diabaikan oleh DPR. Lebih dari itu, salah satu Wakil Ketua Komisi VII DPR justru terlibat korupsi di PT PLN. Contoh kesimpulan rapat-rapat Komsis dengan K/L yang sangat lunak dapat disimak pada lampiran.

3. K/L mendapatkan opini WDP atau TMP dari BPK dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengawasan Komisi-komisi DPR terhadap K/L pasangan kerjanya tidak mampu memperbaiki kelemahan yang terjadi di K/L tersebut.

Dalam melakukan fungsi pengawasannya, pada periode 2014-2019, DPR telah membentuk 9 Tim Pengawas dan Pemantau, Dari 9 Tim Pengawas dan Pemantau bentukan Pimpinan DPR tersebut, sampai dengan 18 September 2019, Tim yang sudah menyampaikan laporan kerjanya ada 6, yaitu: (1) Tim Pengawas PPMI; (2) Tim Penanganan Bencana; (3) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (4) Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus; (5) Tim Implementasi Reformasi DPR-RI; (6) Ibadah Haji. Sedangkan satu Tim (Pengawas Vaksin Palsu) tidak jelas apa hasilnya serta bagaimana nasibnya. Namun dalam Laporan Kinerja DPR tahun 2017-2018 dan 2018-2019 Tim ini sudah tidak disebut lagi. Tim yang tidak ditemukan melaporkan hasil kerjanya ada 2, yaitu: (1) UP2DP; dan (2) Wilayah Perbatasan.

Pada DPR periode 2019-2024 Rapur tanggal 17 Desember 2019 juga membentuk 9 tim Pengawas dan Pemantau DPR, Kesembilan Tim tersebut terdiri atas: (1) Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY dan DKI; (2) Tim Pengawas DPR RI Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; (3) Tim Pemantau Dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (4) Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (5) Tim Pengawas DPR RI Terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana (6) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI; (7) Tim Implementasi Reformasi; (8) Tim Open Parliament (OPI); dan (9) Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa Tim pemantau dan pengawas program pemerintah itu merupakan hasil konsultasi dengan pimpinan fraksi serta komisi di DPR. Tim akan diisi oleh wakil rakyat berdasarkan fraksi. Puan berharap, tim pemantau dan pengawas program pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari pengawasan parlemen sebagai representasi dari rakyat. "Tim pengawas secara khusus dibentuk untuk mengawal serta mengoreksi kebijakan pemerintah agar terus sejalan dengan keinginan rakyat."<sup>23</sup>

Terhadap pembentukan 9 Timwas dan Tim Pemantau DPR tersebut, FORMAPPI menyampaikan pendapat bahwa pembentukan sembilan tim pengawas dan pemantau pemerintah oleh DPR tersebut berpotensi mubazir. Pasalnya, jika mengacu pada tugas dan fungsi DPR, lembaga legislatif ini sejak awal memang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan

---

<sup>23</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/18/10510701/dpr-bentuk-9-tim-pengawas-formappi-jangan-sampai-hanya-jadi-pajangan?page=all#page2>.

pemerintah. Dengan demikian fungsi mengawasi dan memantau kebijakan itu sudah ada dengan sendirinya. “Jika demikian, lalu untuk apa tim-tim pengawas dan pemantau ini dibentuk? Jangan sampai ini hanya sekedar pajangan.” Selama ini DPR melalui alat kelengkapan dewan seperti komisi juga telah melakukan pengawasan serupa. Meski dalam prakteknya kerap tak maksimal. Selain itu, efektivitas tim-tim itu pun juga dipertanyakan. Sebab, banyak tim serupa yang dibentuk sebelumnya dengan misi yang mirip disebutkan oleh Ketua DPR Puan Maharani, hasilnya tidak terlihat hingga akhir masa tugasnya. “Sebagian besar hasil kerja tim itu tak pernah jelas hingga akhir.” Jauh lebih mudah diterima bila tim yang dibentuk berdasarkan pada adanya persoalan yang terjadi dalam tataran pelaksanaan kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam implementasi kebijakan ternyata terjadi persoalan yang cukup pelik, sehingga perlu diselesaikan tataran tim khusus. Namun alih-alih mengawasi pemerintah, tim baru yang dibentuk justru lebih banyak mengawasi kebijakan internal DPR, seperti Tim Pemantau Dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, dan Tim Open Parliament. “Ini kan urusannya pada kelembagaan DPR dan program-program kelembagaan DPR sendiri. Ngapain perlu tim khusus untuk melakukan pengawasan atau pemantauan? Apakah karena DPR tak percaya pada diri mereka sendiri?”<sup>24</sup>

Sekalipun FORMAPPI banyak menyoroti kekurangan kinerja pengawasan yang lemah, tetapi Pimpinan DPR, maupun Pimpinan Komisi tidak cukup responsive memberikan tanggapan atas kritik tersebut.

### **Kinerja Kelembagaan**

Terhadap kinerja kelembagaan, FORMAPPI mencatat bahwa DPR hasil Pemilu 2014 disandera oleh koalisi dua kubu: Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Antar mereka saling berebut kursi Pimpinan Dewan maupun Alat Kelengkapan Dewan yang lainnya. Kemenangan KMP dalam merebut semua kursi Pimpinan DPR dan AKD menyebabkan KIH melakukan boikot sehingga roda kegiatan DPR tidak bisa berjalan. Akhirnya setelah UU No. 17/2014 tentang MD3 diubah dengan UU No. 42/2014 untuk mewisuda ambisi kekuasaan dari KIH di DPR, persetujuan mulai mereda,

Dengan anggota KMP yang besar (dimotori oleh Gerindra dengan pendukung antara lain Golkar, PPP, PAN, dan PKS), sesungguhnya KMP bisa menjadi kelompok penekan yang signifikan bagi Pemerintah yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang hanya beranggotakan PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura). Sementara Demokrat memilih menjadi penyeimbang. DPR baru berfungsi setelah KMP memberikan ruang kepada KIH untuk duduk dalam pimpinan AKD.

---

<sup>24</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/12/18/10510701/dpr-bentuk-9-tim-pengawas-formappi-jangan-sampai-hanya-jadi-pajangan?page=all#page2>).

Meski relatif lebih tenang ketimbang tahun 2015, apalagi setelah PAN, PPP, dan Golkar menyatakan diri bergabung sebagai pendukung Pemerintah di tahun 2016, DPR belum juga solid sebagai lembaga Negara sehingga memiliki *bargaining position* yang rendah ketika berhadapan dengan Pemerintah. Konflik internal DPR terus saja muncul, misalnya perebutan mitra kerja antar komisi di DPR, perebutan pimpinan AKD (termasuk pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan), dan puncaknya adalah jabatan Ketua DPR. Konflik-konflik inilah yang menimbulkan kegaduhan politik di DPR, apalagi setelah jabatan diperoleh lalu tidak amanah. Akibatnya banyak energi dan waktu terbuang percuma, yang pada gilirannya menjadi kontra-produktif. DPR memang seharusnya “gaduh” tetapi bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan gaduh dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Ada salah kaprah dalam pemahaman atau orientasi menjalankan lembaga DPR, seperti terjadinya dikotomi antara oposisi dan pendukung pemerintah dalam system presidensiil. Seharusnya DPR menjadi satu lembaga yang bulat (legislatif) ketika berhadapan dengan pemerintah (eksekutif). Di dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR seyogyanya bersikap professional, yakni mendukung kebijakan pemerintah yang baik untuk kepentingan rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang sebaliknya. Kompromi yang terbangun antara keduanya sering dilandasi kepentingan politik dan golongan di DPR, dan bukan kepentingan yang lebih luas, yakni untuk Negara, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi DPR periode 2014-2019 ini, secara kelembagaan sikapnya terhadap Pemerintah, baik itu dalam bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan tampak biasa-biasa saja.

Dalam fungsi legislasi lebih dihiasi kompromi-kompromi politik ketimbang menghasilkan produk UU yang berkualitas dan berlaku lama (jangka waktu yang panjang) serta membawa kesejahteraan rakyat. Di fungsi anggaran, DPR cenderung menyetujui saja usul Pemerintah dan sangat langka sikap kritis dan keberpihakan terhadap rakyat. Sementara di bidang pengawasan juga demikian, bahkan ketika penggunaan hak angket DPR yang berujung pada rekomendasi tidak ditindaklanjuti meski rekomendasi itu tidak direspon oleh Pemerintah. Pada kasus Pelindo II misalnya, rekomendasi DPR untuk memecat Menteri BUMN tidak diindahkan Presiden. Demikian juga Pansus Angket DPR terhadap KPK, rekomendasinya tidak digubris oleh KPK.

Faktor lain yang mengganggu kinerja DPR adalah begitu seringnya anggota DPR (termasuk pimpinan DPR) bicara apa saja melalui media massa, dan celakanya pendapat pribadi seolah-olah menjadi pendapat DPR sebagai lembaga. Jadi suara DPR lebih nyaring secara personal di luar acara-acara DPR melalui media sosial dan elektronik sehingga hanya menimbulkan kegaduhan dan kontraproduktif bagi demokrasi. Secara kelembagaan saja DPR tidak didengar oleh Pemerintah, apalagi pendapat individual anggota. Oleh karena itu,

dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan melakukan fungsi-fungsi itu semestinya disampaikan di rapat-rapat Komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) lainnya atau paripurna sehingga dapat diselesaikan secara kelembagaan dengan mitra kerja masing-masing. Dengan demikian hasil-hasil keputusan rapat-rapat AKD berkaitan dengan fungsi masing-masing disampaikan oleh Pimpinan DPR sebagai juru bicara kepada Pemerintah. Dengan demikian DPR sebagai badan legislatif berhadapan dengan Pemerintah sebagai badan eksekutif.

Pergantian Ketua DPR hasil Pemilu 2014 tidak terjadi secara normal tetapi *by accident* dimana dua kali seorang ketua diganti bukan karena habis masa jabatannya, melainkan karena terlibat pelanggaran etik lalu mengundurkan diri dan terlibat kasus korupsi. Para pengganti juga memiliki program sendiri-sendiri sehingga ganti pimpinan ganti kebijakan dengan akibat program DPR tidak berkesinambungan. Penggantian Ketua DPR yang seyogyanya menjadi harapan baru meningkatkan kinerja DPR hanya tinggal harapan dan tidak mengubah kinerja DPR ke arah yang lebih baik.

Pola hubungan DPR-Pemerintah diawali dengan kelompok KMP yang sangat besar anggotanya dan diperkirakan akan mampu memboikot setiap kebijakan Pemerintah ternyata tidak bertahan lama. Bak perlombaan, akhirnya satu persatu partai dalam KMP bergabung ke KIH sehingga pendukung Pemerintah di Parlemen semakin gemuk. Saking gemuknya seolah tidak bisa bergerak dan akhirnya kekritisian DPR terhadap Pemerintah tidak begitu tampak.

Keterlibatan anggota DPR dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran etik justru merusak martabat dan kehormatan DPR sendiri. Tuduhan perusak martabat dan kehormatan berasal dari luar hanyalah isapan jempol, sebab kritik yang dianggap menciderai martabat dan kehormatan DPR justru merupakan kecintaan masyarakat terhadap DPR agar menjadi semakin baik.

Kebiasaan anggota DPR yang suka bolos dalam Rapur sudah sangat parah dan karenanya perlu diganjar sanksi yang memadai seperti tidak memberikan tunjangan-tunjangan kehadiran. Sangatlah enak anggota DPR yang tidak kerja dengan bolos tapi tunjangannya tetap mengalir.

Menanggapi sering bolosnya anggota DPR periode 2014-2019 tersebut, pada Pidato pertamanya sebagai Ketua DPR periode 2019-2024, Puan Maharani menyatakan bahwa fraksi-fraksi di DPR agar mengimbau anggotanya datang ke agenda penting di DPR. Salah satunya adalah rapat paripurna. Pimpinan DPR baru akan mencari formula atau mekanisme supaya anggota dewan memiliki komitmen untuk hadir dalam rapat. Namun, anggota DPR memiliki tanggung jawab di Dapil masing-masing untuk turun bertemu konstituen.<sup>25</sup>

Mengenai DPR hasil Pemilu 2019, dalam diskusi Kamisan secara daring bertajuk DPR Tukang Stempel: Menguji Efektivitas Parlemen di bawah Dominasi

---

<sup>25</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4076439/puan-minta-komitmen-fraksi-dpr-soal-kehadiran-anggota-di-rapat-paripurna>

Parpol Koalisi, Kamis, 25 Juni 2020, FORMAPPI menilai bahwa DPR saat ini sama dengan DPR pada era Orde Baru karena tidak menjalankan fungsi kontrol atau *checks and balances* dengan baik melainkan hanya menjadi lembaga pemberi legitimasi atas kebijakan pemerintah.<sup>26</sup>

Pendapat tersebut dibantah oleh Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya. DPR saat ini menunjukkan transparansi dan dialogis dalam setiap pembahasan undang-undang. Dia mencontohkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang digelar secara terbuka dan mengundang banyak pihak. "Bahkan baru kali ini proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah mendapatkan input dari banyak stakeholder"<sup>27</sup>

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan bahwa "DPR RI bukanlah stempel pemerintah, tetapi mitra strategis dalam mengelola negara untuk mencapai tujuannya." DPR sebagai Lembaga yang menjajalakan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran tidak sekedar formal dan procedural. Fungsi legislating, controlling dan budgeting dijalankan tidak sekedar formal dan prosedural, tetapi benar-benar dimaknai secara substansial berdasarkan aspirasi yang diserap dari masyarakat." Mulyanto mencontohkan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat, pimpinan DPR berkomitmen untuk menunda bahkan menghentikan RUU HIP.<sup>28</sup>

Pada rilis Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2020-2021, FORMAPPI menilai bahwa terkait dengan perencanaan kegiatan rapat-rapat di DPR, baik yang diputuskan oleh Bamus maupun dalam Pitado Ketua DPR pada pemukaan Masa Sidang,, banyak yang direncanakan tetapi banyak yang tidak tercapai sesuai rencana. "Hal itu misalnya selalu disebutnya Timwas maupun Tim Pemantau DPR pada setiap Masa Sidang, tetapi kegiatan dan hasil kerjanya tidak pernah diketahui." Kecuali itu, DPR selalu menetapkan target RUU Prioritas, baik setiap satu tahun sidang maupun Prolegnas jangka panjang (2020-2024), tetapi nyatanya target tersebut tidak pernah tercapai. "Itu menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya." FORMAPPI juga menilai bahwa secara umum berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar tidak menitik pada sasaran pengawasan, sebaliknya hanya bersifat normatif dan hanya mencari aman sendiri. Pimpinan DPR bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan Isoman bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul.

---

<sup>26</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/15115461/formappi-dpr-sekarang-hampir-sama-dengan-era-orde-baru>

<sup>27</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/27/legislator-nasdem-sanggah-penyataan-peneliti-formappi-dpr-saat-ini-lebih-transparan-dan-dialogis>

<sup>28</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/27/formappi-samakan-dpr-dengan-parlemen-era-orde-baru-pks-bukan-stempel-pemerintah>

Pada Mei 2021 dan rilis Evaluasi Kinerja DPR selama MS V TS 2020-2021, Formappi juga menyinggung Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sampai akhir MS V TS 2020-2021 belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK. "Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan karena itu keberadaannya mesti ditinjau kembali,"<sup>29</sup>

Pada 31 Mei 2021, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman mengatakan, MKD tidak ingin mendahului Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. MKD masih menunggu perkembangan kasus Azis di KPK. "Kami *nggak* mungkin *offside*," Tidak hanya pada kasus Azis, dalam kasus-kasus sebelumnya MKD juga mengambil sikap yang sama. "Presedennya begitu di kasus-kasus yang dulu di masalah hukum, kami menunggu langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Habiburahkman menuding, Formappi tidak membaca UU MD3, dan aturan tata tertib DPR RI. Silakan saja mereka berpendapat. Ia menyatakan juga bahwa apapun yang kita sampaikan pasti dibilang salah sama itu orang."<sup>30</sup>

Pada rilis secara daring atas evaluasi kinerja DPR selama MS V TS 2020-2021 tanggal 12 Agustus 2021, FORMAPPI menilai bahwa apa yang dilakukan DPR periode 2019-2024 di luar ekspektasi perbaikan dari periode sebelumnya. Masa Sidang I, II, III dan IV berakhir dengan kinerja yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Karena itu harapan untuk menggenjot peningkatan kinerja DPR ada pada penutup Tahun Sidang 2020-2021. Namun harapan tersebut ternyata hanya menjadi pepesan kosong. Hal itu memperjelas posisi DPR yang tidak ada di mana-mana. Fenomena ini tentu sangat membingungkan: dengan kekuasaan DPR yang sangat besar, mestinya inilah waktu bagi mereka untuk menunjukkan kekuasaan itu. Tetapi yang justru terlihat DPR sekarang ini kebingungan, mereka punya kekuasaan besar tetapi tidak tahu mau mengdiakan kekuasaan itu. Akhirnya karena tidak bisa memanfaatkan kekuasaan itu, yang dilakukan ketua DPR misalnya malah memasang spanduk di mana-mana. Memasang spanduk di mana-mana itu, karena memang dia belum melakukan apapun hingga dia dikenal oleh publik." Hal itu bukan hanya dilakukan oleh Ketua DPR, namun juga oleh wakilnya yakni Muhaimin Iskandar untuk menebar baliho ke seluruh Nusantara. Dengan memasang baliho, itu hanya akan menampilkan kegagalan wajah DPR di tengah pandemi. Ini ekspresi yang nyata soal DPR yang gagal memanfaatkan kekuasaannya untuk berbuat banyak kepada rakyat di tengah pandemi. Mereka membuat cara-cara konvensional dengan memunculkan banyak spanduk yang sekadar ingin dikenal oleh publik. Padahal harusnya mengenalkan diri ke rakyat itu dengan adanya fasilitas di DPR dengan melaksanakan fungsi, tapi ketika pelaksanaan

---

<sup>29</sup><https://liputan.co.id/2021/08/formappi-sebut-kinerja-dpr-ri-jadi-pepesan-kosong/>.

<sup>30</sup><https://republika.co.id/berita/qtztsf396/soal-kasus-azis-mkd-kami-nggak-mungkin-offside>.

fungsi ini melempem, mereka memang harus mencari media lain agar dikenal oleh public.<sup>31</sup> Terhadap kritik tersebut, sejauh yang dapat ditelusuri FORMAPPI, tidak ditemukan respon Pimpinan DPR maupun Pimpinan AKD lainnya dan juga Pimpinan Fraksi maupun anggota. Namun dalam Pidato Pembukaan MS I TS 2021-2022, pada 16 Agustus 2021, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa lembaga negara yang dipimpinnya bakal fokus pada sejumlah hal di luar penanganan pandemi Covid-19. Seperti soal strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. Kemudian terkait dengan konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Serta pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pangan. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah<sup>32</sup>.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan data-data atas kritik FORMAPPI dan respon DPR seperti tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Diantara FORMAPPI dengan DPR sebenarnya telah terjadi sahut menyahut. Namun kritikan FORMAPPI yang paling getol ditanggapi/direspon oleh DPR hanyalah yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Dengan tidak bosan-bosannya, FORMAPPI menilai bahwa DPR tidak pernah sekalipun mampu mencapai pengesahan RUU yang sudah ditargetkannya sendiri dalam Program Legislasi Nasional Prioritas, Karena itu dapat dikatakan bahwa DPR gagal memahami kata prioritas.
2. Melalui pimpinan-pimpinan DPR maupun Pimpinan Badan Legislasi, mereka pada umumnya mengamini pendapat FORMAPPI, tetapi selalu disertai dengan kalimat pembelaan bahwa karena setiap RUU harus dibahas bersama dengan Pemerintah dan Wakil Pemerintah sering mangkir dalam membahas RUU, maka yang ikut bersalah juga Pemerintah. Pembelaan seperti itu tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 karena menurut Pasal 20 ayat (1) kewenangan membentuk Undang-undang ada pada DPR. Sebaliknya menurut Pasal 5 ayat (1), Presiden hanya diposisikan berhak mengajukan RUU kepada DPR, Karena itu yang seharusnya bertanggung jawab adalah DPR. Apalagi karena oleh UU No. 2/2018 tentang MD3, DPR diberi kewenangan memanggil pihak Pemerintah, Hal itu diatur pada Pasal 73 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR ssebagaimana

---

<sup>31</sup><https://www.gatra.com/detail/news/519557/politik/formappi-dpr-sekarang-bingung-menjalankan-kekuasaan>

<sup>32</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611a13e915916/dpr-janji-kebut-pembahasan-7-ruu-ini?page=all>

dimaksud pada ayat (1). Rumusan setiap orang dalam pasal UU ini kiranya mengandung arti termasuk Menteri. Dengan demikian DPR memiliki posisi yang kuat untuk memanggil menteri-menteri yang ditugasi mewakili Pemerintah dalam pembahasan dan penyelesaian setiap RUU.

3. Sementara itu kritik FORMAPPI terhadap tidak berdayanya DPR di hadapan Pemerintah dalam membahas RAPBN setiap tahunnya, termasuk sangat jarang menolak atau mengurangi jumlah penambahan penyertaan modal Negara kepada BUMN-BUMN meski BUMN tersebut merugi atau bahkan terjadi korupsi sangat jarang ditanggapi DPR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan FORMAPPI memang benar. Perilaku koruptif anggota DPR jangan-jangan menjadi hambatan untuk kritis dalam membahas keuangan Negara (APBN).
4. FORMAPPI menilai bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sangat lemah. Hal itu misalnya meski serap anggaran Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian setiap tahunnya rata-rata di bawah 95% dan temuan-temuan BPK atas kerugian atas pengelolaan keuangan Negara, sangat minim ditindaklanjuti oleh Komisi maupun Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Bahkan ketika rekomendasi Pansus Angket DPR tidak digubris pun, DPR tidak pernah menggunakan hak lanjutan, yakni hak menyatakan pendapat. Dalam kondisi seperti itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR tidak efektif untuk mewujudkan sistem *checks and balances*. Kondisi seperti itu antara lain disebabkan karena gemuknya koalisi antar Partai yang mendukung pemerintah dan lemahnya koalisi oposisi.
5. FORMAPPI menilai bahwa dalam aspek kelembagaan DPR juga lemah, anti kritik, dan cenderung tertutup. Salah satu sebabnya adalah perencanaan kegiatan DPR yang buruk, dan kurang efektifnya Pimpinan dalam mengkoordinasi kegiatan Komisi-komisi dan AKD lainnya dalam melaksanakan tupoksinya.
6. Akhirnya berdasarkan catatan-catatan di atas FORMAPPI berpendapat bahwa DPR masih “jalan ditempat” bahkan kinerjanya konsisten menurun dalam melaksanakan tupoksinya.

## Lampiran 1:

### KRITIK FORMAPPI DAN TANGGAPAN DPR

Sekedar beberapa contoh, pada lampiran di bawah ini disampaikan “gonggongan” FORMAPPI atas kinerja DPR atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR hasil Pemilu 2014 dan 2019 serta respon yang disampaikan oleh kalangan DPR, baik Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi maupun anggota.

### KRITIK FORMAPPI DAN TANGGAPAN DPR

No.	Kritik Formappi	Tanggapan DPR
1	Pada 10 Januari 2017, FORMAPPI menyampaikan evaluasi bahwa kinerja terkait pengawasan melorot karena kegaduhan politik berupa adanya dua agenda krusial yang berpotensi menciptakan perdebatan dan menyita perhatian parlemen, yakni, pembahasan RUU Pemilu serta pembahasan APBNP 2017 dan RAPBN 2018. Selain itu, ada agenda politik lainnya yang memanasikan iklim 2017, yakni pilkada 2017, persiapan pilkada 2018, dan persiapan Pemilu serentak (DPR dan Presiden) tahun 2019. <sup>33</sup>	Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto tak menampik bahwa adanya agenda politik, khususnya pembahasan RUU Pemilu, bisa membuat fungsi pengawasan menurun, tetapi PAN berkomitmen memberikan kritik dan saran yang tajam,” <sup>34</sup> Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui bahwa jelang tahun politik, fokus anggota dewan juga terpecah kepada partainya masing-masing. <sup>35</sup>
2	FORMAPPI menyatakan bahwa kinerja pengawasan pada 2016 buruk. Hal itu bisa dilihat dari minimnya upaya implementasi hak-hak DPR terhadap pemerintah, baik hak interpelasi maupun angket. Sebab, hanya ada satu kali, yakni hak angket Pelindo.” Meski rekomendasi Pansus tidak digubris Pemerintah, anehnya, DPR diam saja. <sup>36</sup>	Ketua DPR Setya Novanto, pada Rapat Paripurna DPR RI 29 Agustus 2017, menyatakan antara lain bahwa selama Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) non-RUU, yaitu Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II dan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. <sup>37</sup>
3	Pada 15 Maret 2017, FORMAPPI menyatakan bahwa dalam MS III TS 2016-2017 DPR merencanakan	Dalam Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016-2017, menyatakan antara lain bahwa

<sup>33</sup> <https://www.indopos.co.id/index.php/read/2017/01/10/82160/fungsi-pengawasan-dpr-diprediksi-melorot>

<sup>34</sup> <https://www.indopos.co.id/index.php/read/2017/01/10/82160/fungsi-pengawasan-dpr-diprediksi-melorot>.

<sup>35</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/08253641/menanti-dpr-menggenjot-kinerja-legislasi-?page=all>

<sup>36</sup> <https://www.indopos.co.id/index.php/read/2017/01/10/82160/fungsi-pengawasan-dpr-diprediksi-melorot>

<sup>37</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17425/t/DPR+Masih+Dipercaya+Untuk+Salurkan+Aspirasi>

<p>pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap calon anggota untuk enam pejabat publik yaitu calon ketua dan anggota BPH Migas, calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengawas LPP TVRI, calon komisioner KPU dan Bawaslu tetapi tidak ada satu pun yang berjalan. Padahal sebagian lembaga itu membutuhkan anggota yang baru seperti komisioner KPU dan Bawaslu yang akan habis masa jabatannya pada 12 April 2017. Ironisnya, DPR malah melakukan uji kelayakan dan kepatutan itu terhadap lembaga publik yang tidak direncanakan, yakni calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). "Rencana <i>fit and proper test</i> calon anggota BSBI itu tidak disebut oleh pimpinan DPR saat membuka masa sidang III. Ini merupakan rencana kerja 'siluman' (selundupan)," pungkasnya.<sup>38</sup></p>	<p>selama TS 2016-2017, melalui Komisi-komisi. DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan pengangkatan terhadap 15 (lima belas) pejabat publik. "DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.<sup>39</sup></p>
---	--

<sup>38</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cba1c396209/performa-buruk--dpr-tak-hasilkan-uu-selama-masa-sidang-ketiga>

<sup>39</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17425/t/DPR+Masih+Dipercaya+Untuk+Salurkan+Aspirasi>.

4	<p>Pada 28 Juni 2017. Formappi menyatakan bahwa hingga pertengahan 2017 baru 4 RUU yang disahkan menjadi undang-undang, yakni UU Pemajuan Kebudayaan, UU Sistem Perbukuan, UU Arsitek, dan UU Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, hanya ada tiga RUU kumulatif terbuka, yakni, RUU Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina, RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2016 dan RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Sebanyak 46 RUU masuk daftar Prolegnas 2017. Namun, waktu yang dimiliki DPR tinggal dua kali masa sidang. (Baca juga: Dari 50 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Baru Selesaikan 9 Undang-Undang.<sup>40</sup></p>	<p>Rendahnya kinerja legislasi DPR tak dibantah oleh pimpinan dewan. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sepakat bahwa masih banyak produk legislasi yang belum rampung dibahas. "Kami memang paling terlihat dalam legislasi dan legislasi kami banyak mengalami kekurangan." kata Agus, Selasa (1/8/2017). Meski begitu, alasan dari kendornya kinerja legislasi harus dilihat dari akar permasalahan. Di samping itu, produk legislasi juga merupakan hasil kerja DPR bersama pemerintah. Sehingga, Agus mengatakan, tak bisa hanya DPR yang dikritik. "Kalau legislasi jelek, bukan DPR-nya saja yang jelek, pemerintah juga jelek. Sehingga marilah kita perbaiki dan koordinasi,"<sup>41</sup></p>
5	<p>Pada 3 Juli 2017, Formappi menyatakan kinerja legislasi DPR pada tahun 2017 merupakan kinerja yang terburuk dibanding tahun sebelumnya. Menurut data yang dihimpun Formappi, target prioritas 2017 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU, DPR baru menuntaskan dua di antaranya yaitu RUU Perbukuan dan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi selama enam bulan kerja DPR baru menghasilkan dua UU baru dari Daftar RUU Prioritas. Dibandingkan kinerja anggota DPR periode 2009-2014, kinerja DPR tahun ini juga kalah jauh. Pada tahun ketiga,</p>	<p>Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menyatakan sampai sekarang belum ada kemajuan terkait capaian prolegnas, beberapa pembahasan UU sampai sekarang belum ada perubahan hal tersebut lantaran pembahasannya yang tak kunjung selesai. "Kendalanya itu adalah pembahasan tingkat I di masing-masing Panja dan Pansus yang belum berkembang sama sekali, belum ada pergerakan sama sekali, seperti UU MD3 macet," tegasnya. Begitupun dengan RUU yang merupakan inisiatif pemerintah. Beberapa UU inisiatif pemerintah</p>

<sup>40</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/08253641/menanti-dpr-menggenjot-kinerja-legislasi?page=all>

<sup>41</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/08253641/menanti-dpr-menggenjot-kinerja-legislasi?page=all>

<p>DPR periode 2009-2014 mengesahkan lebih dari 40 RUU. "Kinerja legislasi DPR 2017 sejauh ini bisa dibilang jauh dari harapan. Malah bisa dikatakan kinerja legislasi DPR hingga setengah tahun terakhir sangat buruk." Menurutnya, sulit mengharapkan bahwa target 50 RUU Prioritas akan bisa dikejar dalam sisa waktu enam bulan ke depan. "Tentu saja kinerja DPR seperti ini sangat tak sebanding dengan kinerja DPR periode yang lalu dimana di tahun ketiga seperti tahun ini bisa mencatat hasil UU baru sebanyak kurang lebih 20 RUU." Dia mengatakan, salah satu faktor penyebab yang membuat jebloknya kinerja legislasi DPR periode ini adalah kesibukan DPR dengan urusan perburuan kekuasaan untuk mereka sendiri. "Tak mengherankan setiap tahun mereka selalu ingin mengutak-atik kursi pimpinan. Sampai-sampai UU MD3 beberapa kali direvisi hanya demi mengakomodasi kepentingan partai-partai di DPR." Perburuan kekuasaan antar partai, lanjut Lucius, membuat pembahasan RUU lain menjadi berantakan. Ditambah lagi dengan alotnya pembahasan RUU Pemilu. Ini juga soal kepentingan partai-partai. "Sehingga nampak sekali penyandera utama kinerja legislasi DPR adalah kepentingan politik DPR yang tak pernah bisa merasa puas dengan kekuasaan yang kini mereka telah genggam,"<sup>42</sup></p>	<p>belum ada kejelasan karena belum masuknya draft RUU tersebut. Firman juga mengeluhkan kewenangan Baleg yang terbatas dan tidak punya kewenangan lebih membahas UU seperti layaknya komisi, Panja dan Pansus.<sup>43</sup> Sementara itu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pada 1 Agustus 2017 mengatakan bahwa lembaganya bakal menyusun prioritas untuk Program Legislasi Nasional memasuki tahun politik pada 2018 dan 2019. "Dengan waktu tersisa ini maka yang prioritas harus didahulukan. Ambil saripati, mana yang benar-benar dibutuhkan saat ini, dan jangan terjebak pada kuantitas," kata Taufik, politikus Partai Amanat Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017. Ia menegaskan agar Dewan memperhatikan kualitas undang-undang yang dihasilkan ketimbang kuantitas. Ia pun meminta komunikasi antara DPR dan pemerintah ditingkatkan. "Parameter kesuksesan prolegnas adalah kesiapan pemerintah dan DPR, keduanya harus siap." Taufik Kurniawan juga menyatakan pada 29 Agustus 2017 bahwa menginjak usianya ke-72, DPR masih kerap menerima kritik tentang belum maksimalnya target legislasi. Menanggapi hal itu, ia menyatakan, target legislasi tak bisa hanya dilihat</p>
---	---

<sup>42</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1217724/12/formappi-kinerja-legislasi-dpr-paling-buruk-tahun-2017-1499094921>

<sup>43</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1217724/12/formappi-kinerja-legislasi-dpr-paling-buruk-tahun-2017-1499094921>

		dari aspek kuantitas, tapi perlu dipahami dari segi kualitas. Sedangkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto meminta pemerintah turut mempercepat pembahasan RUU yang masuk dalam prolegnas. Dia menyebut target penyelesaian prolegnas harus realistis pada tahun politik mendatang. "Karena yang sibuk bukan hanya DPR, pemerintah juga sibuk, masyarakat juga sibuk," ujar Agus soal legislasi dua tahun ke depan. <sup>44</sup>
6	Pada Evaluasi Kinerja DPR Tahun 2017 FORMAPPI menyebut krisis kepemimpinan berdampak negatif pada kinerja DPR yang terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepemimpinan DPR pada 2017 menjadi yang terburuk. Selain tidak profesional dan gonta-ganti ketua, beberapa dari mereka tersangkut masalah pribadi dan kasus hukum," Karena itu tidak heran kinerja DPR tahun ini buruk." <sup>45</sup>	Fahri Hamzah menolak anggapan soal krisis kepemimpinan DPR. Ia berkata, kinerja DPR tidak berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dialaminya, Fadli atau Setnov." Mempersoalkan kepemimpinan, urusannya apa? Itu kan gejala politik biasa. Jokowi juga melakukan perombakan kabinet. Apakah gara-gara itu lalu dianggap bermasalah?" kata Fahri kepada BBC Indonesia. "Ini tidak relevan. Saya agak bingung untuk menganalisis karena argumennya tidak jelas." <sup>46</sup>
7	Menurut FORMAPPI dalam Catatan Akhir Tahun 2017: 'Lagi-lagi tak capai target' Dalam hiruk-pikuk persoalan itu, Formappi menyatakan DPR lagi-lagi gagal memenuhi target kinerja, khususnya di bidang legislasi. Hingga akhir masa sidang DPR tahun 2017, badan legislatif hanya mengesahkan enam rancangan undang-undang prioritas. Padahal	Soal capaian kinerja itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, justru menyalahkan pemerintah. Menurutnya, mayoritas RUU tidak rampung karena perwakilan pemerintah kerap tidak menghadiri rapat pembahasan rancangan beleid. "Target kami sedikit meleset, disebabkan ketidakhadiran pemerintah dalam

<sup>44</sup> <https://nasional.tempo.co/read/896304/kinerja-legislasi-buruk-dpr-sederhanakan-target-di-2018-2019>

<sup>45</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235>

<sup>46</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235>

<p>tahun ini terdapat 52 rancangan beleid yang masuk program legislasi nasional prioritas.</p> <p>Selain enam UU tersebut, ada 11 UU yang juga disahkan DPR tahun ini, namun masuk kategori kumulatif terbuka, seperti konvensi internasional, UU APBN, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). UU dalam kategori itu tidak membutuhkan rancangan atau pembahasan sehingga proses pengesahannya lebih cepat.</p> <p>"Tahun 2017 seharusnya menjadi momen puncak DPR menghasilkan karya terbaik, tapi faktanya tidak," Sebagai perbandingan, pada 2015 dan 2016, DPR masing-masing mengesahkan 3 dan 10 RUU prioritas. FORMAPPI menilai bahwa kinerja DPR di sektor legislasi tidak akan meningkat drastis di tahun 2018. Apalagi, kata dia, 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang diwarnai Pilkada serentak, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden.</p> <p>"Mereka akan sibuk dengan urusan dapil, terpilih lagi atau tidak. Konsentrasi mereka mungkin saja berkurang. Kami tidak yakin kinerja mereka pada 2018 akan membaik,"<sup>47</sup></p>	<p>pembahasan RUU. Ada beberapa UU yang seharusnya sudah selesai tapi tidak dihadiri pemerintah," ujar Supratman kepada BBC Indonesia. Supratman menuding perwakilan pemerintah tidak pernah menghadiri pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara dan RUU Pertembakauan. "Pembahasan RUU itu sudah berkali-kali diperpanjang, tapi menterinya belum pernah datang pembahasan sama sekali,"<sup>48</sup></p> <p>Wakil Ketua Baleg, Dossy Iskandar Prasetyo, mendesak pimpinan DPR mengambil langkah strategis agar target legislasi itu dapat tuntas sebelum periode 2014-2019 berakhir. Dossy mengatakan meski tugas DPR tidak hanya membuat UU, peraturan perundang-undangan itu selalu menjadi objek utama dalam mengukur kinerja lembaganya.</p> <p>"Bagaimanapun ikon DPR adalah produk legislasi. Pimpinan DPR harus mengambil inisiatif mempercepat tanggungan itu, dibagi ke pansus, panja, atau baleg. Apalagi ini jelang tahun politik," Soal tuduhan pemerintah memperlambat pembahasan RUU, Fahri Hamzah mengusulkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki hak legislasi. Ia mengklaim, DPR selama ini selalu mengajukan serta mengesahkan RUU yang memuat kepentingan masyarakat. "DPR sangat aspiratif. Yang sulit adalah pemerintah. Tapi kalau punya mau dan untuk meringankan pemerintah, mereka akan kebut itu. "Saya usul,</p>
---	--

<sup>47</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235>

<sup>48</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235>

		seharusnya eksekutif tidak perlu terlibat dalam pembuatan UU, cukup menyatakan setuju atau tidak setuju di ujung. Kalau mau melobi, lobilah melalui partai pemerintah sejak awal," kata Fahri. <sup>49</sup>
8	<p>Koordinator FORMAPPI menyatakan bahwa Pembangunan Gedung DPR Jadi Polemik, Wakil Rakyat Dinilai Tak Belajar dari Kesalahan (20/09/2017) Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai, munculnya polemik wacana pembangunan gedung DPR tidak terlepas dari sikap para politisi di dalamnya. Menurut dia, anggota parlemen kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak pas terkait pembangunan gedung. Hal ini disampaikan Sebastian dalam Seminar Nasional bertajuk "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).</p> <p>"Kita baru bicara grand desain dan seperti apa bangunannya, lalu tiba-tiba anggota DPR bilang, bicara tempat fitnes, kolam renang dan lain-lain, sehingga fokusnya terdistorsi," kata Sebastian. "Kayak sekarang pengen gedung (baru) tau-tau mau bangun apartemen. Ini yang selalu terulang dan membuat gagasan utama terabaikan dan mendistorsi rencana awal," tambah dia. Menurut dia, hal tersebut selalu berulang sejak beberapa kali isu pembangunan gedung DPR bergulir. (baca: Fahri Hamzah Sebut Apartemen Anggota DPR Pakai Dana</p>	<p>Seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat menolak rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan karena dinilai belum tepat di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN meminta untuk seluruh anggota dewan dari Fraksi PAN fokus meningkatkan kinerja DPR saja. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, kami (PAN) konsisten dengan sikap penolakannya terhadap pembangunan apartemen bagi anggota dewan, tetapi dia juga meminta masyarakat jangan menutup diri atas usulan DPR untuk membangun fasilitas yang sudah tidak layak guna. "PAN memang menolak pembangunan gedung baru DPR, tetapi dalam perbaikan fasilitas gedung DPR, saya meminta masyarakat jangan menutup diri karena perbaikan fasilitas gedung merupakan kebutuhan mendesak," ujar Yandri dalam acara pertemuan antara Fraksi PAN dengan Aliansi Masyarakat Sipil, di Lantai 20, Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (9/9/2017). Yandri menegaskan, beberapa fasilitas yang ada di gedung DPR sudah banyak yang jauh dari layak. Ia mencontohkan, fasilitas lift</p>

<sup>49</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235>

	Swasta) Maka dari itu, menurut dia, wajar saja jika masyarakat menilai negatif atas rencana pembangunan tersebut. "Kelihatannya DPR kurang belajar dari kegagalan sebelumnya yang membuat kesalahan selalu terulang," kata dia. <sup>50</sup>	yang sudah beberapa kali jatuh dan toilet anggota dewan di tiap lantai Fraksi hanya ada satu sehingga harus antri apabila ingin buang air. "Coba saja liat toilet anggota dewan yang cuma ada satu, sampai kita mau buang air kecil saja harus bergantian," keluh Yandri. Lebih jauh, Yandri menyampaikan, tahun depan Indonesia memasuki tahun politik, sehingga jangan sampai anggaran negara untuk DPR yang besar itu diwujudkan dengan bentuk yang tidak sesuai peruntukannya. <sup>51</sup>
9	Koordinator Formappi mengatakan: selama 2017, terutama dalam politik anggaran, DPR tidak memiliki keberpihakan pada rakyat. Untuk anggaran di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat memang mengalami peningkatan pada 2018 nanti. Ia mencontohkan, sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, transfer daerah, dan kedaulatan pangan. Namun sayangnya, peningkatan di sektor-sektor itu bukan atas inisiatif DPR melainkan dari pemerintah. <sup>52</sup>	Setya Novanto: DPR Sudah Pro Rakyat Kok: Ketua DPR Setya Novanto pada Jumat, 1 September 2017 mengemukakan, dalam setiap pembahasan APBN bersama dengan pemerintah, DPR berpedoman dan berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui alokasi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, meningkat 188,93 persen dibandingkan tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa. <sup>53</sup>
10	Pada 23 November 2018 Formappi mengkritik kinerja anggota DPR selama MS I TS 2018-2019 gagal paham tentang arti prolegnas prioritas karena implementasi fungsi legislasi DPR sangat minim hasil dan prestasi. Selama 55 hari kerja tidak ada satupun UU dari	Melalui keterangan tertulis pada 24/11/2018, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan tidak terkejut. <i>Kritikan FORAPPI itu Bagian Rasa Cinta Masyarakat terhadap DPR</i> . Dia pun menghargai upaya yang dilakukan FORMAPPI untuk mendorong DPR menjadi lebih baik. "Saya sangat menghargai upaya dan kerja keras

<sup>50</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/14024811/pembangunan-gedung-dpr-jadi-polemik-wakil-rakyat-dinilai-tak-belajar-dari>

<sup>51</sup> <http://www.koran-jakarta.com/fraksi-pan-tolak-gedung-baru-dpr/>

<sup>52</sup> <https://www.viva.co.id/berita/politik/989774-dpr-dikritik-tak-pro-rakyat-soal-politik-anggaran>

<sup>53</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/01/setya-novanto-dpr-sudah-pro-rakyat-kok>

<p>prolegnas yang dibahas dan disahkan.<sup>54</sup></p>	<p>FORMAPPI yang ingin mendorong DPR menjadi baik. Sekalipun begitu, respon Ketua DPR tetap saja disertai dengan sayap pembelaan, yaitu berharap agar kritik FORMAPPI juga dapat didengarkan oleh pemerintah karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan UU di DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. DPR tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka. Intinya, kalau kita mau jujur pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah." Ia mencontohkan kendala pembahasan pada RUU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah sampai saat ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga DPR belum bisa memulai pembahasannya. Atau kendala lainnya seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Karantina Kesehatan: karena adanya pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah, Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. "Setelah terus menerus diberikan warning oleh DPR RI, bahkan saya sampai perlu menelepon Ibu Menteri Kesehatan, akhirnya rapat pembahasan bisa kembali dilanjutkan dan RUU tersebut bisa disahkan pada Juli 2018.</p>
--	---

<sup>54</sup><https://today.line.me/id/pc/article/Jawab+Kritik+Ketua+DPR+Sebut+Sejumlah+RUU+Terhambat+karena+Pemerintah-MQn7BM>

		<p>Contoh lain, RUU tentang Pengaturan Peredaran Minuman beralkohol dan RUU Tembakau yang sudah melewati 10 kali masa persidangan belum juga tuntas itu antara lain karena minimnya kehadiran dari pihak pemerintah. Semua ada catatannya di kesekjenan DPR RI.<sup>55</sup></p>
11	<p>Pada Desember 2018, FORMAPPI menilai kinerja DPR selama MS ITS 2018-2019. DPR belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, bahkan cenderung jeblok. Hal itu nampak antara lain: implementasi fungsi legislasi DPR sangat minim hasil dan prestasi. DPR menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU Prioritas. RUU-RUU yang sudah dibahas selama lebih dari 5 kali masa sidangpun pada rapat paripurna penutupan masa sidang I Tahun Sidang 2018-2019 justru disetujui untuk diperpanjang waktu pembahasannya.</p> <p>Selain itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran ada Komisi tertentu di DPR yang mengadakan rapat pembahasan pagu anggaran dengan Kementerian atau Lembaga mitra kerjanya dilakukan secara tertutup. Rapat tertutup tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Mestinya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel. "Ketertutupan ini menyalahi apa yang menjadi slogan DPR yang berulang kali dicanangkan sebagai</p>	<p>Pada 3 Desember 2018, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui adanya penurunan intensitas kinerja anggota DPR di tahun politik atau menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Hal itu ia ungkapkan saat dimintai tanggapannya mengenai penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyebut kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 cenderung turun. Menurut Fadli, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019. Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil). "Saya kira pasti akan terjadi penurunan intensitas (kehadiran) karena ada banyaknya kegiatan di dapil kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Ini terjadi di semua partai politik," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018). Meski demikian,</p>

<sup>55</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/kritikan-formappi-bamsuet-itu-bagian-rasa-cinta-masyarakat-terhadap-dpr?page=2>

	<p>DPR modern bahkan terkahir ada "DPR Now"<sup>56</sup></p>	<p>Fadli mengklaim penurunan tingkat kehadiran anggota tidak mengganggu kinerja DPR. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Ia mengatakan, fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran tetap berjalan. Fadli mencontohkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II "Seperti hari ini kan kita mengesahkan sebuah UU juga dan masih ada UU yang lain. Kerja DPR bukan hanya legislasi, tapi juga pengawasan dan budgeting. Saya kira hal-hal yang penting tidak ada yang terganggu,"<sup>57</sup></p>
<p>12</p>	<p>Pada Januari 2020. FORMAPPI menganggap DPR tak lagi galak ke pemerintah karena urung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan digantikan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi, padahal di periode sebelumnya nampak sangat galak di hadapan pemerintah.<sup>58</sup></p>	<p>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 22 Januari 2020 menjawab pernyataan Formappi yang menganggap DPR tak lagi galak ke pemerintah karena urung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan digantikan dengan Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi. Menurutnya, DPR lebih mementingkan uang nasabah kembali dibanding sekadar dianggap galak. "Sekarang, penting galak apa penting uang masyarakat itu kembali? Lebih penting kinerja perusahaan asuransi yang jeblok itu jadi</p>

<sup>56</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/15074961/fadli-zon-minta-rakyat-maklum-kinerja-dpr-jeblok?page=all>

<sup>57</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/15074961/fadli-zon-minta-rakyat-maklum-kinerja-dpr-jeblok?page=all>

<sup>58</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4868493/pimpinan-dpr-soal-pansus-jiwasraya-lebih-penting-galak-atau-uang-kembali?single=1>

		<p>bagus dan penegakan hukumnya jalan atau kemudian lebih penting sekadar galak-galakan?" Lanjutnya, ia mengatakan DPR sendiri tidak ingin mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini tengah dijalankan Kejaksaan Agung dan Polri, serta tidak ingin mengganggu pemerintah dalam upaya menehatkan Jiwasraya. Menurut dia, wacana Pansus berubah, dan diganti dengan Panja di tiap-tiap komisi terkait. "Kalau kami sekadar pengen melakukan pencitraan, ya kami bikin Pansus-lah. Panggil sana, panggil sini, tapi nanti nggak sampai tujuan, malah mengganggu apa yang sudah dilakukan sekarang. Menurut kami, sekarang semua sudah berada di jalur yang benar. Lebih lanjut, Dasco menjelaskan perubahan wacana Pansus Jiwasraya menjadi Panja Jiwasraya dilakukan setelah dirinya mendengarkan paparan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Polri. Kemudian, ia mengaku paham, jika penanganan Jiwasraya meliputi skema pengembalian, skema peningkatan dan perbaikan kinerja Jiwasraya, dan penegakan hukum. "Perubahan cepat itu karena tiba-tiba ada perkembangan cepat juga dari pemerintah, maka kita respons cepat juga. Kalau kita respons dengan Pansus, kita bisa ketinggalan kereta." "Kita bingung, ketika DPR merespons cepat, DPR dikatakan kita kok lembek, kok berubah, kok</p>
--	--	--

		kelihatannya dipengaruhi pemerintah. Padahal kami melakukan respons yang cepat." <sup>59</sup>
13	Pada 23 Maret 2020, Formappi, menilai <i>rapid test Corona</i> yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak. hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat. <sup>60</sup>	Pada 23 Maret 2020, Sekjen DPR. Indra Iskandar angkat suara terkait rencana pemeriksaan test Corona bagi anggota DPR dan keluarga bahwa pengadaan alat test tersebut tidak menggunakan uang negara. Ini sumbangan dari beberapa orang orang yang peduli supaya bisa bekerja dengan baik, bukan dari APBN. Jadi jangan dibawa ke politik atau dipolitisasi. <sup>61</sup> Sebaliknya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya, pada 23 Maret 2020 meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok, di tengah kondisi saat ini, ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya <sup>62</sup>

<sup>59</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read267793/dianggap-gak-galak-lagi-dpr-lebih-penting-galak-atau-uang-nasabah-jiwaseraya-kembali/0>

<sup>60</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4950846/dikritik-soal-tes-corona-sekjen-dpr-bukan-dari-apbn-jangan-dipolitisasi?single=1>

<sup>61</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4950846/dikritik-soal-tes-corona-sekjen-dpr-bukan-dari-apbn-jangan-dipolitisasi?single=1>

<sup>62</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4950846/dikritik-soal-tes-corona-sekjen-dpr-bukan-dari-apbn-jangan-dipolitisasi?single=1>

14	<p>Pada 13 April 2020, FORMAPPI, mengkritik DPR karena tetap melanjutkan proses pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Proses pembahasan RUU Ciptaker membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan hanya DPR dan pemerintah saja. Partisipasi publik saat ini tersumbat karena situasi pandemi yang tak memungkinkan publik bisa secara aktif memikirkan apa yang akan diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Partisipasi publik itu tak bisa diganti dengan menghadirkan satu dua lembaga yang bisa diklaim mewakili publik melalui rapat dengar pendapat umum.<sup>63</sup></p>	<p>Wakil Ketua Baleg. Willy Aditya kepada wartawan, Senin (13/4/2020) menyatakan bahwa Baleg DPR, selaku alat kelengkapan dewan (AKD) yang berwenang membahas RUU Ciptaker, merasa serba salah. Jangan prejudice (kecurigaan). DPR itu tugas konstitusionalnya membuat Undang-Undang. Nanti dibidang DPR nggak produktif, DPR-nya melempem. Jadi DPR ini maju kena mundur kena. Willy menegaskan proses RUU Ciptaker saat ini belum memasuki tahap pembahasan substansi. Sebelum masuk tahap pembahasan substansi, Baleg akan menggelar rapat kerja (raker) dengan pihak pemerintah untuk memastikan kesiapan RUU tersebut. "Besok kita tanyakan kesiapan pemerintah dan skemanya, apakah tetap seperti awal atau tidak, apakah ada substansi yang berubah atau tidak." Anggota Fraksi NasDem itu menuturkan Baleg menyadari bahwa RUU Ciptaker mendapat penolakan dari berbagai pihak. Karena itu, Baleg memutuskan untuk mengubah alur proses pembahasan. Dalam proses pembahasan RUU Ciptaker Baleg memundurkan proses penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) dari masing-masing fraksi. Selain itu, Baleg juga memutuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih dulu sebelum RUU Ciptaker masuk tahap pembahasan substansinya. "Bilang sama</p>
----	--	--

<sup>63</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4975520/dikritik-gegara-bahas-omnibus-law-di-tengah-corona-dpr-maju-kena-mundur-kena?single=1>

		<p>teman-teman. Sebelum mereka berpikir, Baleg sudah membuat keputusan itu. Ini di balik, kita menyusun DIM belakangan, Pada tahap awal itu RDPU, semua akan dilibatkan. Jadi mereka baru mengusulkan kita sudah membuat agenda untuk itu." DPR itu aspiratif dengan caranya seperti apa. Masalah substansi kita perdebatkan, dialogkan bersama-sama dengan mengedepankan data, dengan mengedepankan argumentasi. Willy menjelaskan semangat pembuatan omnibus law disampaikan oleh Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 di DPR pada 20 Oktober 2019 lalu. Di mana, saat itu Jokowi menyatakan akan membangun demokrasi ekonomi. "Yang menjadi stand point-nya, Presiden melalui pidato politiknya saat pelantikan itu kan berjanji menjadikan omnibus law ini sebagai momentum membangun demokrasi ekonomi kita dengan melakukan kemudahan investasi dan debirokrasi perizinan." Sekadar informasi, dari 11 klaster yang ada dalam RUU Ciptaker, klaster ketenagakerjaan merupakan yang paling disorot, khususnya oleh kalangan buruh. Fraksi NasDem menilai klaster ketenagakerjaan lebih baik tidak dimasukkan ke RUU Ciptaker. "Bahkan NasDem menangkapnya, kalau klaster ketenagakerjaan bermasalah itu</p>
--	--	---

		<p>dipindahkan ke UU sektoral lebih bagus." <sup>64</sup></p> <p>Berbeda dengan pendapat Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai Nasdem, pada 14 April 2020, Fraksi PKS dan Partai Demokrat menolak Omnibus Law RUU Ciptaker dibahas saat Corona. Penolakan itu disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS Adang Daradjatun dalam rapat kerja (raker) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah pada 14 April 2020. Adang menyebut jika pembahasan RUU Ciptaker dilanjutkan akan timbul persepsi bahwa DPR tidak memiliki empati, sebab masyarakat saat ini tengah berjuang melawan virus Corona. Sedangkan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menilai belum tepat saatnya untuk kita bicara RUU Ciptaker karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian kita sangat serius, terutama dari pemerintah dan kita semua. Sebaiknya energi DPR saat ini difokuskan dalam penanganan penyebaran virus Corona. <sup>65</sup></p>
15	<p>Dalam diskusi Kamisan secara daring bertajuk DPR Tukang Stempel: Menguji Efektivitas Parlemen di bawah Dominasi Parpol Koalisi, Kamis (25/6/2020). FORMAPPI menilai DPR saat ini sama dengan DPR pada era Orde Baru karena tidak menjalankan fungsi kontrol atau <i>checks and balances</i> dengan baik melainkan</p>	<p>Penilaian ini dibantah oleh beberapa anggota DPR seperti berikut: Menurut Legislator dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya. DPR saat ini menunjukkan transparansi dan dialogis dalam setiap pembahasan undang-undang. Dia mencontohkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang digelar secara terbuka dan</p>

<sup>64</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4975520/dikritik-gegara-bahas-omnibus-law-di-tengah-corona-dpr-maju-kena-mundur-kena?single=1>

<sup>65</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4976725/fraksi-pks-pd-tolak-omnibus-law-ruu-ciptaker-dibahas-saat-corona>

	<p>hanya menjadi lembaga pemberi legitimasi atas kebijakan pemerintah.<sup>66</sup></p>	<p>mengundang banyak pihak. "Bahkan baru kali ini proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah mendapatkan input dari banyak stakeholder."<sup>67</sup> Sedangkan Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan bahwa "DPR RI bukanlah stempel pemerintah, tetapi mitra strategis dalam mengelola negara untuk mencapai tujuannya." DPR sebagai sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran tidak sekadar formal dan prosedural. Fungsi legislating, controlling dan budgeting dijalankan tidak sekadar formal dan prosedural, tetapi benar-benar dimaknai secara substansial berdasarkan aspirasi yang diserap dari masyarakat." Mulyanto mencontohkan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat, pimpinan DPR berkomitmen untuk menunda bahkan menghentikan RUU HIP.<sup>68</sup></p>
--	---	--

<sup>66</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/15115461/formappi-dpr-sekarang-hampir-sama-dengan-era-orde-baru>

<sup>67</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/27/legislator-nasdem-sanggah-penyataan-peneliti-formappi-dpr-saat-ini-lebih-transparan-dan-dialogis>

<sup>68</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/27/formappi-samakan-dpr-dengan-parlemen-era-orde-baru-pks-bukan-stempel-pemerintah>

16	<p>Pada 7 Januari 2021, FORMAPPI mengkritik kinerja Satgas Lawan Covid-19 yang tak jelas fungsinya dan karena itu dibubarkan saja.<sup>69</sup></p>	<p>Anggota Satgas Lawan COVID-19 DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman justru mengaku aneh, mengapa inisiatif baik dari parlemen malah harus dibubarkan. Ia mengkritik balik dan meminta pihak yang mengusulkan agar satgas dibubarkan, melakukan introspeksi diri. Habiburokhman menegaskan semua kegiatan di Satgas Lawan COVID-19 menggunakan dana pribadi. Tidak ada sepeser pun dana APBN yang digelontorkan. "Nilainya mencapai miliaran. Saya sendiri sampai habis ratusan juta," kata dia. Oleh sebab itu, menurut Habiburokhman, Satgas Lawan COVID-19 di DPR akan terus dijalankan pada 2021.<sup>70</sup></p>
17	<p>Pada 26 Februari 2021: Formappi Soal Vaksinasi DPR: Harusnya Jadi Promosi, Justru Ajang Petak Umpet, yaitu DPR membawa keluarganya. Mestinya, anggota dewan tak perlu khawatir dan kucing-kucingan. Karena, pada saatnya nanti semua warga negara akan menerima vaksin termasuk keluarganya. Sesungguhnya DPR memperlihatkan bahwa kebijakan menyangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin adalah sesuatu yang menyimpang dan akan merusak citra dan kehormatan DPR.<sup>71</sup></p>	<p>Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membantah bila vaksinasi terhadap anggota DPR bersama keluarganya dilaksanakan secara tertutup. Mengenai jumlah, berapa yang sudah divaksinasi, siapa saja saya gak hafal karena saya juga sedang reses. Dia menjelaskan, jatah vaksinasi anggota dewan bersama keluarga diberikan oleh Kementerian Kesehatan. "Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes. DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR. Jadi alokasi itu dari Kemenkes." Selain keluarga, pegawai di lingkungan kompleks</p>

<sup>69</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/santi-dewi/tak-jelas-fungsinya-satgas-lawan-covid-dpr-diusulkan-dibubarkan> ; <https://infomurni.com/tak-jelas-fungsinya-satgas-lawan-covid-dpr-diusulkan-dibubarkan/>

<sup>70</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/santi-dewi/tak-jelas-fungsinya-satgas-lawan-covid-dpr-diusulkan-dibubarkan>

<sup>71</sup> <https://www.merdeka.com/politik/formappi-soal-vaksinasi-dpr-harusnya-jadi-promosi-justru-ajang-petak-umpet.html?page=all>

		Parlemen juga mendapatkan vaksinasi. Seperti staf pendukung, petugas keamanan dan kebersihan. Sebab sudah banyak pegawai di lingkup DPR terpapar corona. "Sehingga kita tekankan sekali lagi, tidak ada yang tertutup. Kami mendukung program pemerintah, cuma karena masih reses, mungkin dari fraksinya terlambat dari fraksi ke anggotanya," terang Dasco. <sup>72</sup>
18	Dalam konferensi pers pada 7 Maret 2021, FORMAPPI mengkritisi kinerja DPR baik dari fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 bahwa kinerja DPR pada masa sidang III kemarin masih sama dengan kinerja DPR pada masa sidang tahun sebelumnya yang kerap dinilai buruk. "DPR gagal menjadikan Masa Sidang III sebagai momentum untuk membangkitkan optimisme dalam meningkatkan kinerja legislasi." <sup>73</sup>	DPR RI Tanggapi Kritikan Formappi: Pada 7 Maret 2021, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab kritikan Formappi terkait kinerja DPR pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 lalu. Dasco mengatakan DPR merupakan lembaga yang terdiri dari fraksi yang beragam dan berbeda dengan kementerian atau institusi seperti Polri dan TNI yang pengambilan keputusannya secara <i>top-down</i> . "Di DPR RI ini harus berdasarkan musyawarah dan mufakat karena kita menghindarkan voting," Terkait kritikan Formappi bahwa perencanaan legislasi DPR buruk lantaran sampai masa sidang III belum juga mengesahkan Prolegnas Prioritas, Dasco mengakui memang sempat terjadi tarik menarik antarfraksi terkait penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Namun, ia mengatakan, hal tersebut sudah selesai dan

<sup>72</sup> <https://www.merdeka.com/politik/formappi-soal-vaksinasi-dpr-harusnya-jadi-promosi-justru-ajang-petak-umpet.html?page=all>

<sup>73</sup> <https://www.republika.co.id/berita/gplkg4428/dpr-ri-tanggapi-kritikan-formappi>

		<p>akan diputuskan dalam masa sidang mendatang.</p> <p>"Dalam program legislasi memang ada sedikit tarik menarik antara fraksi-fraksi yang kemudian kita sudah bersepakat bahwa kita akan tetapkan Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Maret ini di awal masa sidang," ucapnya. Ketua harian Partai Gerindra itu juga menanggapi kritikan Formappi terkait sikap DPR yang tidak tegas terhadap perubahan struktur anggaran yang ditetapkan APBN 2021 oleh Kementerian Keuangan. Dasco mengatakan, pimpinan DPR bersama dengan Banggar dan Komisi XI akan mengadakan rapat konsultasi terkait hal itu. Kendati demikian ia berterima kasih kepada Formappi yang kerap menyampaikan kritiknya kepada DPR. Menurutnya, kritikan dari Formappi merupakan masukan agar DPR kedepan lebih baik.<sup>74</sup></p>
19	<p>FORMAPPI mengkritik DPR yang belum juga sahan prolegnas prioritas 2021. Mestinya pengesahan prolegnas prioritas sudah harus selesai di tahun 2020 agar di tahun 2021 DPR segera bisa memulai proses penyusunan dan proses pembahasan. Sedangkan yang terjadi, hingga menjelang berakhirnya bulan Maret 2021, DPR belum juga membawa prolegnas prioritas ke paripurna.</p> <p>"Dalam sejarah pembahasan legislasi, belum ada RUU yang bisa</p>	<p>Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons terkait belum disahkannya prolegnas prioritas 2021 di paripurna. Ia mengatakan bahwa bamus digelar hari Senin (22/3.2021). "Hari ini bamus kok," ucapnya. Dirinya tak merespons saat ditanya terkait kapan akan rapat paripurna pengesahan prolegnas prioritas akan digelar.<sup>76</sup></p>

<sup>74</sup> <https://www.republika.co.id/berita/gplkg4428/dpr-ri-tanggapi-kritikan-formappi>

<sup>76</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qgda35354/formappi-nilai-perencanaan-legislasi-dpr-kacau>

	tuntas dibahas dalam tiga kali masa sidang. Itu artinya jangan-jangan untuk tahun 2021 ini, tak akan ada RUU yang disahkan oleh DPR. Mengenangkan bukan? <sup>75</sup>	
20	Pada April 2021, FORMAPPI menyampaikan pandangan adanya politisasi Vaksin Nusantara yang dilakukan oleh DPR RI terutama Komisi IX. Pasalnya, Formappi melihat DPR RI gencar melakukan kampanye vaksin Nusantara padahal BPOM belum mengeluarkan izin uji klinis tahap II. <sup>77</sup>	Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertemakan "Apa Kabar Vaksin Nusantara?" pada 15/4/2021 menyampaikan, jika ada politisasi Vaksin Nusantara seperti yang dituduhkan, maka anggota DPR RI tidak perlu membahayakan diri dengan bersedia diambil sampel untuk vaksinasi. Politisi dari PKB ini mengatakan, bahwa Vaksin Nusantara ini masih dalam uji klinis tahap II dan masih dalam proses penelitian di RSPAD. Ia tartarik menjadi relawan Vaksin Nusantara, semata-mata untuk mendukung perkembangan vaksin dalam negeri. "Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat sebagai support saya kepada Vaksin Nusantara ini dengan saya mau terlibat juga dalam fase penelitian ini. Kalau soal politis, pasti semua ini kan ada sisi politisnya," <sup>78</sup>

<sup>75</sup> <https://www.republika.co.id/berita/ggda35354/formappi-nilai-perencanaan-legislasi-dpr-kacau>

<sup>77</sup> <https://politik.rmol.id/read/2021/04/15/483695/pimpinan-komisi-ix-kalau-vaksin-nusantara-politis-tidak-perlu-saya-bahayakan-diri-sendiri>

<sup>78</sup> <https://politik.rmol.id/read/2021/04/15/483695/pimpinan-komisi-ix-kalau-vaksin-nusantara-politis-tidak-perlu-saya-bahayakan-diri-sendiri>

21	<p>Pada 5 Mei 2021, FORMAPPI menilai bahwa MKD DPR mengulur waktu memproses Azis."Apalagi dukungan yang ditunjukkan DPR dengan mengulur-ulur proses penyidikan dugaan pelanggaran kode etik atas Azis. Dukungan samar-samar DPR itu bisa saja mengindikasikan kuatnya pengaruh Azis di DPR sehingga MKD pun seolah-olah sangat bijak untuk mengulur-ukur penyelidikan etik,"<sup>79</sup></p>	<p>Pada 31 Mei 2021, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman mengatakan, MKD tidak ingin mendahului Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. MKD masih menunggu perkembangan kasus Azis di KPK.</p> <p>"Kami <i>nggak</i> mungkin <i>offside</i>," Tidak hanya pada kasus Azis, dalam kasus-kasus sebelumnya MKD juga mengambil sikap yang sama. "Presedennya begitu di kasus-kasus yang dulu di masalah hukum, kami menunggu langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Habiburrahkman menuding, Formappi tidak membaca UU MD3, dan aturan tata tertib DPR RI. Silakan saja mereka berpendapat. Ia menyatakan juga bahwa apapun yang kita sampaikan pasti dibilang salah sama itu orang."<sup>80</sup></p>
----	---	--

<sup>79</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5558494/formappi-tuding-mkd-tak-serius-usut-laporan-terhadap-azis-syamsuddin>

<sup>80</sup> <https://republika.co.id/berita/qtztsf396/soal-kasus-azis-mkd-kami-nggak-mungkin-offside>

22	<p>Pada 19 Juni 2021 Formappi menyatakan, Kesetjenan dan Pimpinan DPR RI perlu didorong untuk memastikan bahwa rapat virtual di parlemen tetap menjamin keterbukaan akses publik.</p> <p>"Jangan sampai rapat virtual membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan."</p> <p>Proses pembahasan RAPBN 2022, rentan dengan muncul banyak kontroversi terkait dengan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan, dana Alutsista. Kecuali itu "huru-hara" Pemilu 2024 yang mulai muncul juga membuka ruang bagi kemungkinan penyelewengan RAPBN 2022 untuk kepentingan Pemilu 2024." Kalau proses pembahasan dilakukan secara virtual, itu rentan 'dimanipulasi'. Mereka menjadikan rapat virtual untuk menghindari publik dalam pembicaraan hal penting terkait anggaran dan RUU kontroversial." Karenanya, "Perlu keputusan bersama antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi mengenai aturan selama dua minggu ke depan." <sup>81</sup></p>	<p>DPR Jawab Kekhawatiran Publik: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada GoNEWS.co, "(Mengenai, red) rapat anggaran, itu siklus anggaran tinggal dua kali rapat saja dan selama ini nggak ada masalah," Dan untuk RUU kontroversial, Dasco menjelaskan, tidak ada pembahasan final dalam dua pekan mendatang. "Biasanya RUU itu kalau ditugaskan ke komisi, ya baru rapat internal untuk membagi-bagi jadwal kalau dalam dua minggu. Ini kan lockdown terbatasnya cuma 2 minggu." <sup>82</sup></p>
----	---	--

<sup>81</sup> <https://www.gonews.co/berita/baca/2021/06/19/memastikan-rapat-virtual-tak-memanipulasi-pembahasan-anggaran-dan-ruu-kontroversial>

<sup>82</sup> <https://www.gonews.co/berita/baca/2021/06/19/memastikan-rapat-virtual-tak-memanipulasi-pembahasan-anggaran-dan-ruu-kontroversial>

23	<p>Dalam Youtube Kompas TV, Kamis (15/7/2021). Formappi Nilai Permintaan ICU untuk Wakil Rakyat Berlebihan, dan terkesan konyol. Pasalnya, di tengah lonjakan kasus Covid-19 saat ini, permintaan ICU tidak hanya dari kalangan anggota dewan saja namun, masyarakat juga sama membutuhkannya. Fasilitas ICU tidak diberikan kepada mereka yang memiliki status sosial saja dan pihak rumah sakit lah yang berhak menentukan apakah seseorang perlu mendapatkan fasilitas ICU. <sup>83</sup></p>	<p>Politisi PAN, Partaonan Saleh Daulay: mengklarifikasi sbb: Pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM tanggal (13/7/2021). Ditimya menuatakan: "Saya tidak mau lagi mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami oleh anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin dari Papua, tidak mendapat ICU sampai akhirnya meninggal setelah dipindahkan ke RSPAD, tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat." Saleh juga menceritakan, ia sempat kehilangan keluarganya yang terpapar Covid-19 karena kesulitan mendapat rumah sakit. Untuk itu, ia meminta agar Menkes menambah kepastian tempat tidur di rumah sakit bagi para pasien Covid-19. Kemudian, ia juga menyinggung soal usulan Wasekjen PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta dibuatkan rumah sakit khusus pejabat. Menurutnya, usulan tersebut adalah buntut dari pengalaman emosional Rosaline yang melihat buruknya kondisi penanganan pasien Covid-19. "Ini yang dipertimbangkan anggota kita sampai ada yang emosional minta RS khusus pejabat. Itu sebenarnya karena emosional, bukan dari hati." "Karena dia (Rosaline) saksikan sendiri betapa susahya orang bertahan hidup tanpa ada</p>
----	--	---

<sup>83</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/15/formappi-nilai-permintaan-icu-untuk-wakil-rakyat-berlebihan-begini-klarifikasi-politisi-pan?page=all>

		<p>bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan Covid-19 yang dahsyat." Alhasil, ia meminta agar Menkes mempersiapkan skenario terburuk terkait pelayanan dan pengobatan jika pasien Covid-19 naik hingga 60 persen.</p> <p>"Pak menteri memprediksi bahwa orang yang terpapar Covid-19 belum tentu turun dalam satu dua minggu."</p> <p>"Dan nanti kalau memang terus naik ini perlu persiapan yang cukup matang." <sup>84</sup></p>
24	<p>Dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021 pada 12 Agustus 2021, Formappi menilai, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 merupakan yang terburuk selama era Reformasi.</p> <p>"Kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, tapi nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang."</p> <p>Berkaca pada capaian legislasi DPR 2019-2024 yang baru bisa menyelesaikan 4 (empat) RUU prioritas selama dua tahun masa sidang. Padahal, pada kurun waktu yang sama, DPR 2014-2019 mampu mengesahkan 16 RUU selama dua tahun pertama masa kerja mereka.</p> <p>Selain capaian legislasi yang rendah, DPR juga gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi di mana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa</p>	<p>Seolah merespon kritik Formappi atas buruknya kinerja DPR selama satu tahun sidang (2020-2021), dalam Pidato Pembukaan MS I TS 2021-2022 pada 16 Agustus 2021, Ketua DPR Puan Maharani antara lain menyatakan hal-hal berikut: kinerja Prolegnas merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Karena itu Puan meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.</p> <p>Puan juga mengatakan bahwa kendati di tengah pandemi. RUU-RUU yang bakal disebut pembahasannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang memang sempat <i>mandeg</i> pembahasannya akibat belum adanya titik temu soal posisi lembaga independen pengelola data pribadi, apakah berada di bawah presiden atau</li> </ol>

<sup>84</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/15/formappi-nilai-permintaan-icu-untuk-wakil-rakyat-berlebihan-begini-klarifikasi-politisi-pan?page=all>

<p>pandemi ini." Formppi berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang." <sup>85</sup></p>	<p>kementerian komunikasi dan informatika.</p> <p>2. Revisi terhadap UU No.23/2007 tentang Penanggulangan Bencan yang sempat dibahas DPR bersama Pemerintah tetapi belum menemui titik temu terkait dengan isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alokasi anggarannya.</p> <p>3.revisi terhadap perubahan kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjadi usul inisiatif bersama DPR dan pemerintah.</p> <p>4. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (usul inisiatif pemerintah).</p> <p>5. Revisi terhadap UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (berada Komisi V DPR) yang telah menyerap aspirasi dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan.</p> <p>6. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. RUU ini merupakan usul inisiatif DPD yang sebelumnya telah merumuskan dan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat DPD. Para senator DPD pun berulang kali mendorong DPR agar dapat segera membahasnya.</p> <p>7. Revisi terhadap UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang berada di Komisi X DPR dan sudah mulai menggelar berbagai</p>
--	---

<sup>85</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/15400501/formappi-anggap-kinerja-dpr-2019-2024-terburuk-selama-reformasi>

		<p>RDPU untuk menyerap masukan dari sejumlah pakar dalam rangka memperkaya materi muatan draf RUU tersebut.<sup>86</sup> Ketua DPR juga berjanji bakal fokus pada sejumlah hal di luar penanganan pandemi Covid-19. Seperti soal strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. Kemudian terkait dengan konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Serta pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pangan. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah.”<sup>87</sup> Sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah. Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.</p>
--	--	---

<sup>86</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20210816/15/1430248/buka-rapat-paripurna-ini-pidato-lengkap-ketua-dpr-ri-puan-maharani>

<sup>87</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611a13e915916/dpr-janji-kebut-pembahasan-7-ruu-ini?page=all>

		<p>Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian; Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020.<sup>88</sup></p>
25	<p>Dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021 pada 12 Agustus 2021, Formappi menilai, kinerja DPR periode 2019-2024 merupakan yang terburuk selama era Reformasi. "Kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, tapi nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang."</p> <p>Berkaca pada capaian legislasi DPR 2019-2024 yang baru bisa menyelesaikan 4 (empat) RUU prioritas selama dua tahun masa sidang. Padahal, pada kurun waktu yang sama, DPR 2014-2019 mampu mengesahkan 16 RUU selama dua tahun pertama masa kerja mereka.<sup>89</sup></p>	<p>Dalam Rapat Paripurna DPR pada 24 Agustus 2021, Anggota Fraksi PKS, Slamet, meminta Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjawab kritik yang menyebutkan bahwa kinerja lembaga DPR periode 2019-2024 berpotensi menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Pasalnya, tingkat kepuasan publik terhadap DPR saat ini hanya berada di angka 15 persen. "Kami mohon kepada Ibu Ketua dan pimpinan yang lain untuk kemudian bagaimana isu yang ada hari ini bisa kita jawab dengan kerja kerja produktivitas." Ia mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR yang rendah seolah menunjukkan kinerja DPR periode 2019-2024 lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, hal itu semakin</p>

<sup>88</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210812195436-32-679732/formappi-sebut-dpr-era-puan-berpotensi-jadi-yang-terburuk>

<sup>89</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/15400501/formappi-anggap-kinerja-dpr-2019-2024-terburuk-selama-reformasi>

		terlihat karena DPR periode 2019-2024 baru mengesahkan sebanyak 4 (empat) rancangan undang-undang selama dua tahun. <sup>90</sup>
26	Pada rilis Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2020-2021, FORMAPPI menyatakan bahwa perpanjangan pembahasan RUU memang diizinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Namun alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas, misalnya karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak, serta beban tugas komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus. "Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU- RUU tidak terinformasikan kepada publik." <sup>91</sup>	Pada Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. Ketua DPR Puan Maharani antara lain menyatakan hal-hal yang dapat dipahami sebagai alasan perpanjangan pembahasan RUU bahwa: 1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang memang sempat <i>mandeg</i> pembahasannya akibat belum adanya titik temu soal posisi lembaga independen pengelola data pribadi, apakah berada di bawah presiden atau kementerian komunikasi dan informatika. 2. Revisi terhadap UU No.23/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sempat dibahas DPR bersama Pemerintah tetapi belum menemui titik temu terkait dengan isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alokasi anggarannya. <sup>92</sup>

<sup>90</sup> <https://kronologi.id/2021/08/25/f-pks-minta-puan-jawab-soal-kritik-dpr-terburuk-sepanjang-sejarah/>

<sup>91</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/17501161/formappi-dpr-mesti-lebih-produktif-capai-target-pengesahan-ruu>

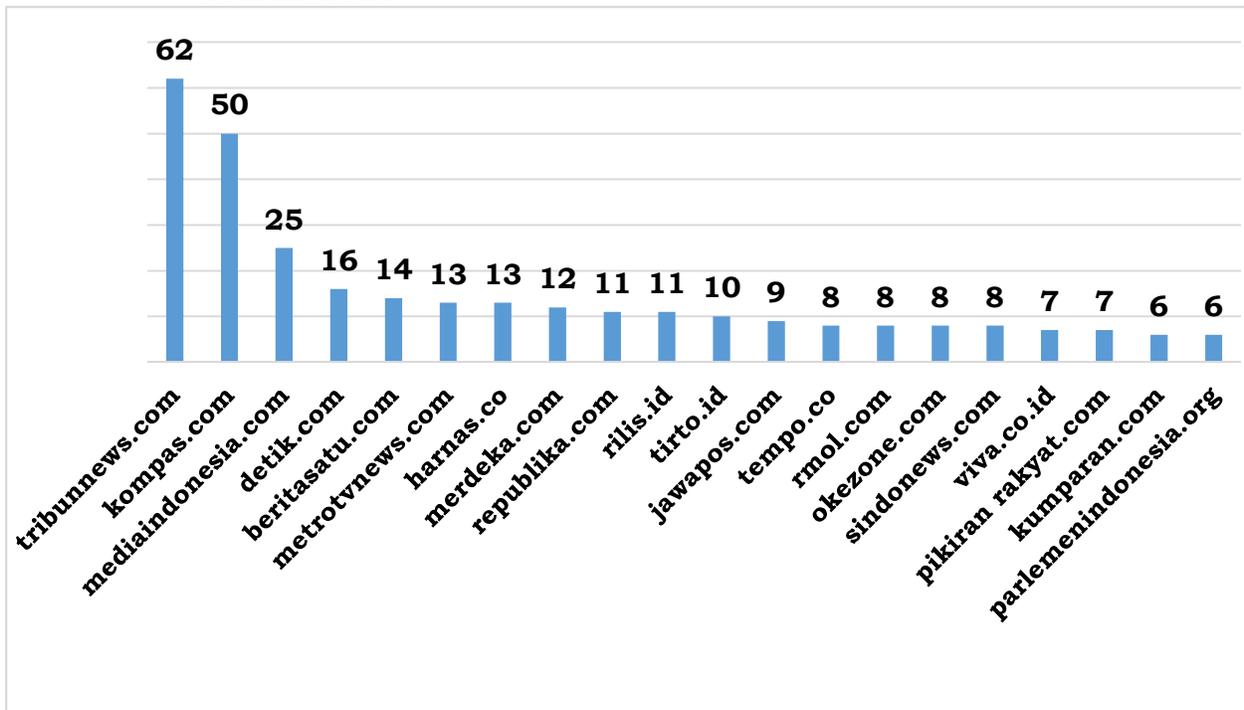
<sup>92</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20210816/15/1430248/buka-rapat-paripurna-ini-pidato-lengkap-ketua-dpr-ri-puan-maharani> ; <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611a13e915916/dpr-janji-kebut-pembahasan-7-ruu-ini?page=all>)

## Lampiran 2

### LIPUTAN MEDIA ATAS KEGIATAN FORMAPPI DALAM MENINGKRITISI DPR

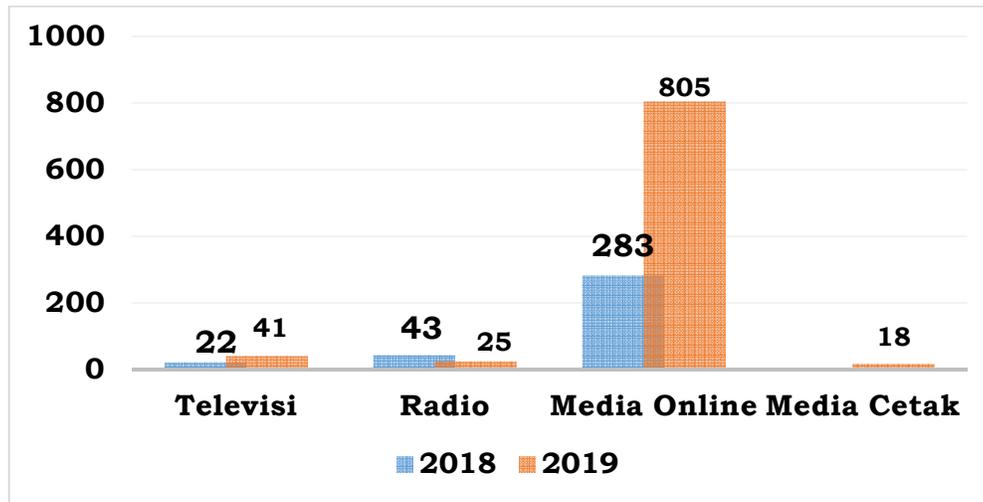
Uraian-uraian berikut ditampilkan jumlah liputan media atas evaluasi kinerja DPR, diskusi Kamisan, catatan akhir tahun DPR, rilis dan juga opini-opini peneliti FORMAPPI terhadap isu-isu yang berkembang tentang ke-DPR-an. Pada tahun 2017 misalnya, kegiatan FORMAPPI diliput oleh media-media *main stream* seperti *Kompas*, *Media Indonesia*, dan *The Jakarta Post*, kecuali itu juga disiarkan oleh televisi, radio dan media *online*. Dari keseluruhan media yang meliput, paling banyak adalah media *online*. Setidaknya ada 49 media online seperti antara lain: *kompas.com*, *mediaindonesia.com*, *tribunnews.com*, *detik.com*, *beritasatu.com*, *metrotvnews.com*, *republika.com*, *liputan6.com*, *merdeka.com*, *tempo.co*, *okezone.com*, dan *viva.co.id*, *antaranews.com*, *bbc.com*, *cnnindonesia.com*, *jpn.com*, Jika ditotal ada 356 berita (Liputan media atas Formappi tahun 2017 selengkapnya lihat diagram 1).

**Diagram 1: Liputan Media Atas Kegiatan FORMAPPI Mengkritisi DPR Tahun 2017**



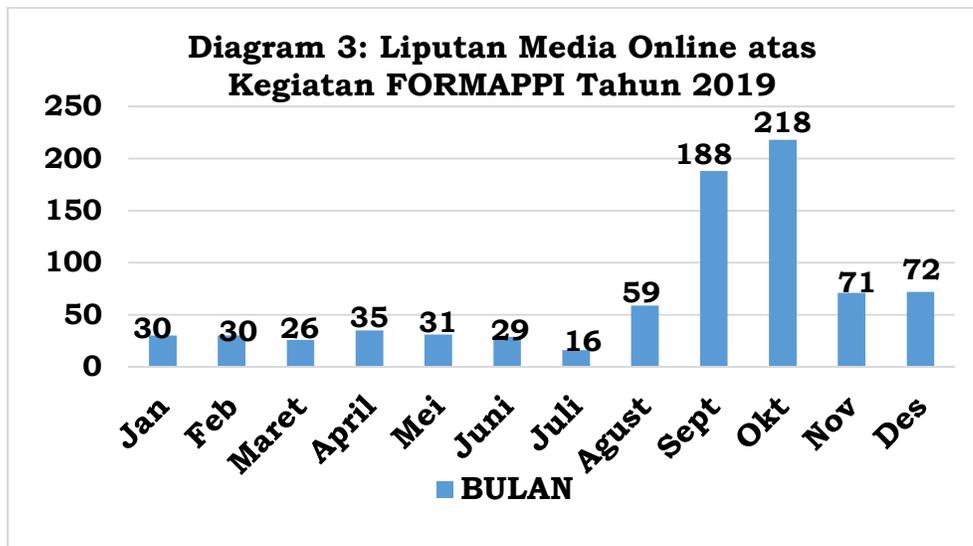
Sedangkan liputan media atas kegiatan FORMAPPI tahun 2018-2019 dapat disimak pada diagram 2.

**Diagram 2: Liputan Media atas Kegiatan FORMAPPI Tahun 2018-2019**



Berita atau liputan media online atas kiprah FORMAPPI tahun 2019 dapat disimak pada diagram 2 (paling banyak terjadi pada saat menjelang dan sesudah pelantikan anggota DPR periode 2019-2024) yaitu pada bulan September (188 liputan) dan Oktober (218 liputan).

Pada diagram 3 disajikan liputan media online atas kiprah FORMAPPI tahun 2019.



Liputan media atas rilis FORMAPPI terhadap Kinerja DPR tahun 2020 dapat disimak pada **tabel 1** berikut ini.

**Tabel 1: Liputan Media atas Rilis Evaluasi Kinerja DPR Tahun 2020**

<b>EVAKIN DPR</b>	<b>TANGGAL RILIS</b>	<b>TEMA</b>	<b>MEDIA YANG MELIPUT</b>	<b>JUMLH LIPUTAN</b>
MS II TS 2019-2020	22 Maret 2020 (LANGSUNG MASUK WEB)	TUNA DAN KONTRA PRODUKTIF	Langsung diunggah di website Formappi: parlemenindonesi a.org	Tidak diketahui
MS III TS 2019-2020	14 Juni 2020 (LANGSUNG MASUK WEB)	DPR “BERTEKUK LUTUT” PADA PEMERINTAH	Langsung diunggah di website Formappi: parlemenindonesi a.org	Tidak diketahui
MS IV TS 2019-2020	13 Agustus 2020 (Langsung Masuk Web)	LESU DI TENGAH PANDEMI	Langsung diunggah di website Formappi: parlemenindonesi a.org	Tidak diketahui
REFLEKSI SETAHUN DPR	2 Oktober 2020 (Langsung dikirim ke Media)	DPR DI TENGAN PANDEMI Refleksi Setahun DPR RI Pasca Pelantikan	Langsung dikirim ke berbagai media	19
MS I TS 2020-2021	5 November 2020	KINERJA ABNORMAL DI ERA NEW NORMAL	15	47
MS II TS 2020-2021	7 Januari 2021	NIHIL LEGISLASI DAN TAK PEDULI KEUANGAN NEGARA	10	36

**Liputan Media atas Kegiatan FORMAPPI Tahun 2021 (belum dihitung)**

